

**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE*, UKURAN
DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL
REPORTING (ISR)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

ANING YUSRINA HANIFAH

NIM : 17520024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE*, UKURAN
DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL
REPORTING (ISR)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ANING YUSRINA HANIFAH

NIM : 17520024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE*, UKURAN
DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL
REPORTING (ISR)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

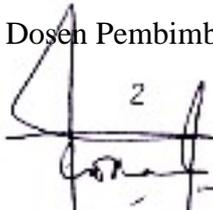
Oleh

ANING YUSRINA HANIFAH

NIM : 17520024

Telah disetujui pada tanggal 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

NIP 197707022006042001

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH *PROFITABILITAS, LEVERAGE*, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

ANING YUSRINA HANIFAH

NIM : 17520024

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 03 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

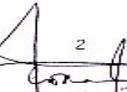
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 19770702200604 2 001

3. Penguji Utama

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak. CA
NIP. 19761019200801 2 011

Tanda Tangan

:()

:()

:()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aning Yusrina Hanifah

NIM : 17520024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Mei 2021

Hormat saya,



Aning Yusrina Hanifah

NIM: 17520024

HALAMAN MOTTO

”Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah : 216)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”**. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang.

Penulis mmenyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen maupun karyawan khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Kedua orang tua, kedua adik serta seluruh keluargayang selalu mendukung, mengusahakan, memberikan kasih sayang serta senantiasa mendoakan.

7. Teman-teman di Ponpes Raudhatul Jannah yang sennatiasa memberikan semangat, dukungan serta doa.
8. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2017 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kritik maupun saran yang membangun sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	18
2.2.2 <i>Agency Theory</i>	25
2.2.3 <i>Legitimacy Theory</i>	25
2.2.4 <i>Stakeholder Theory</i>	27
2.2.5 <i>Syariah Enterprise Theory (SET)</i>	28
2.2.5 Bank Umum Syariah	29
2.2.6 <i>Return On Assets (ROA)</i>	33
2.2.7 <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	35
2.2.8 Ukuran Dewan Komsiaris	36

2.2.9 Ukuran Dewan Pengawas Syariah.....	38
2.3 Kerangka Konseptual	40
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Objek Penelitian	45
3.3 Populasi dan sampel.....	45
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.5 Data dan Jenis Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Definisi Operasional Variabel	48
3.7.1 <i>Return On Total Assets (ROA)</i>	53
3.7.2 <i>Debt to Equity (DER)</i>	53
3.7.3 Ukuran Dewan Komisaris.....	53
3.7.8 Ukuran Dewan Pengawas Syariah.....	53
3.8 Analisis Data	54
3.8.1 Statistik Deskriptif	54
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	54
3.8.2.1 <i>Uji Normalitas</i>	54
3.8.2.2 <i>Uji Multikolinieritas</i>	54
3.8.2.3 <i>Uji Autokorelasi</i>	55
3.8.2.4 <i>Uji Heteroskedastisitas</i>	55
3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda	56
3.8.4 Uji Hipotesis	56
3.8.4.1 <i>Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik T)</i>	56
3.8.4.2 <i>Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)</i>	57
3.8.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil Penelitian.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.1.2 Hasil Analisa <i>Content Analysis</i>	59

4.1.3 Hasil Analisa Statistik Deskriptif	63
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.1.4.1 Uji Normalitas	66
4.1.4.2 Uji Multikolinearitas	67
4.1.4.3 Uji Autokorelasi	68
4.1.4.4 Uji Heterokedastisitas	69
4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.1.6 Hasil Uji Hipotesis.....	72
4.1.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	72
4.1.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	74
4.1.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	75
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
4.2.1 Tingkat pengungkapan informasi sosial berdasarkan indeks <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	76
4.2.2 Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage</i> , ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara parsial terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> pada bank umum syariah di Indonesia	78
4.2.2.1 Pengaruh <i>Profitabilitas</i> terhadap pengungkapan ISR	78
4.2.2.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap pengungkapan ISR	80
4.2.2.3 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR ..	81
4.2.2.4 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR	82
4.2.3 Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage</i> , ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia.....	84
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Tingkat Pengungkapan ISR.....	59

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah	7
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Table 3.1 Pengambilan Sampel.....	46
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan	46
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 3.4 Item-item Pengungkapan <i>ISR</i>	49
Tabel 4.1 Hasil Sampel	58
Tabel 4.2 Skor Pengungkapan <i>ISR</i>	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sampel Kolmogorov-Smirnov</i>	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin-Watson</i>	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park).....	69
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji T)	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data *Return On Assets* (X1)

Lampiran 2 Data *Debt to Equity* (X2)

Lampiran 3 Data Ukuran Dewan Komisaris (X3)

Lampiran 4 Data Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X4)

Lampiran 5 Data *Islamic Social Reporting* (Y)

Lampiran 6 Uji Statistik

Lampiran 7 Biodata Penulis

Lampiran 8 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Aning Yusrina Hanifah. 2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, Ukuran Dewan Komisaris Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*.”

Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

Kata Kunci : *Profitabilitas, Leverage*, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah dan *Islamic Social Reporting*.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dinilai cukup baik. Perkembangan tersebut hendaknya diikuti dengan pertanggungjawaban sosial berdasarkan nilai-nilai islam untuk menambah kepercayaan para stakeholder yang kerap disebut *Islamic Social Reporting (ISR)*. Untuk mengetahui besarnya pengungkapan perlu dilakukan analisis terhadap faktor –faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel *Profitabilitas, Leverage*, ukuran dewan komisaris serta ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang didapatkan dari website masing-masing bank. Populasi dalam penelitian ini adalah bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2017-2019. Teknik pengambilan menggunakan teknik purposive sampling sehingga mendapatkan sampel berjumlah 11 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, sedangkan variabel *profitabilitas, leverage* dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Secara simultan variabel *profitabilitas, leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

ABSTRACT

Aning Yusrina Hanifah. 2021.THESIS. Title: “The Effect of Profitability, Leverage, Size of the Board Commissioners and Size of the Sharia Supervisory Board on Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure”.

Advisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

Keywords : Profitability, Leverage, Size of the Board Commissioners, Size of the Sharia Supervisory Board and Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure

The development of Islamic banking in Indonesia is considered quite good. This development should be followed by social responsibility based on Islamic values to increase the trust of stakeholders which is often called Social Reporting (ISR). To find out the amount of disclosure, it is necessary to analyze the factors that can influence ISR disclosure. The purpose of this study is to determine the effect of the variable Profitability, Leverage, size of the board of commissioners and the size of the Islamic supervisory board on the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) at the Bank. General Sharia in Indonesia.

This research is a quantitative research. The data used are financial reports obtained from the websites of each bank. The population in this study are Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority in the 2017-2019 period. The sampling technique used purposive sampling technique so that a sample of 11 Islamic Commercial Banks was obtained. The data analysis technique used multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that partially the variable size of the board of commissioners has a significant effect on the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR), while the variables of profitability, leverage and size of the sharia supervisory board have no effect on the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR). Simultaneously, the variables of profitability, leverage, the size of the board of commissioners and the size of the sharia supervisory board have an effect on the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR).

ملخص البحث

أنع يسرنا حنيفة. ٢٠٢١، أطروحة. تأثير الربحية والسيطرة ونسبة مجلس المفوضين ونسبة مجلس الرقابة على الإفصاح من التقارير الإجتماعي الإسلامي.

المشرف: الحاجة ميلدونا، بكالوريوس إقتصاد، ماجستير إدارة
الكلمة الرئيسية: الربحية والسيطرة ونسبة مجلس المفوضين ونسبة مجلس الرقابة والتقارير الإجتماعي الإسلامي

تتطور المصرفية الإسلامية ف إندونيسيا تطورا حسنا في إندونيسيا. ينتغي على هذا التطور بالمسؤولية الإجتماعية تعتمد على قيمة الإسلام لزيادة الإعتقاد من قبل أصحاب المصلحة تسمى بالتقارير الإجتماعي. لمعرفة النتائج الإفشاء يحتاج إلى تحليل العوامل التي تؤثر بالإفصاح التقارير الإجتماعي الإسلامي. الغرد من هذا البحث لمعرفة تأثير متغيرات الربحية والسيطرة ونسبة مجلس المفوضين ونسبة مجلس الرقابة على الإفصاح من التقارير الإجتماعي الإسلامي في البنك التجارية الإسلامية في إندونيسيا.

نوع هذا البحث هو البحث الكمي. البيانات المستخدمة هي القوائم المالية مأخوذة من موقع الإلكتروني من البنك المتعلق. المجتمع في هذا البحث هو البنك التجارية الإسلامية المسجلة في هيئة الخدمات المالية على فترة 2017 – 2019. تستخدم تقنية في هذا البحث طريقة أخذ عينات هادفة حتى ينال إلى 11 البنك التجارية الإسلامية. تقنية تحليل البيانات هي الانحدار الخطي المتعدد.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحجم المتغير لمجلس المفوضين جزئيا له تأثير كبير على الإفصاح عن التقارير الاجتماعي الإسلامية ، في حين أن متغيرات الربحية والرافعة وحجم هيئة الرقابة الشرعية ليس لها أي تأثير على الكشف عن التقارير الاجتماعي الإسلامية. في الوقت نفسه ، تؤثر متغيرات الربحية والرافعة المالية وحجم مجلس المفوضين وحجم هيئة الرقابة الشرعية على الإفصاح عن التقارير الاجتماعي الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian mengenai konsep pertanggung jawaban sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu karena pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Reporting (CSR)* dianggap sebagai inti dalam etika bisnis. Adanya gagasan mengenai *Corporate Social Reporting (CSR)* menjadikan perusahaan dituntut tidak hanya mengacu pada konsep *single bottom line* saja yaitu *corporate value* melainkan juga mengacu pada konsep *triple bottom line (3P)* yaitu laba (*Profit*), manusia (*People*) dan lingkungan (*Planet*), akan tetapi pada tahun 2010 bulan November awal terdapat peluncuran ISO 26000 oleh lembaga *International Organization for standardization (ISO)* mengenai pedoman dalam tanggung jawab sosial sehingga konsep *triple bottom line (3P)* ditambah dengan aspek prosedur (*Prosedure*) sehingga perusahaan melakukan tanggung jawabnya dengan cara menyisihkan laba (*Profit*) yang diperolehnya untuk upaya pengembangan manusia (*people*) serta lingkungan (*planet*) sesuai prosedur (*Procedure*) yang tepat (Fauziah & J., 2013).

Regulasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban sosial (*CSR*) di Indonesia tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 yang telah di sahkan pada tanggal 20 juli 2007. Dalam pasal 74 undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya tidak lagi melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*CSR*) secara sukarela (*voluntary*)

melainkan pengungkapannya bersifat wajib dilakukan (*mandatory*). (sawitri, Juanda, & Jati, 2017). Dengan adanya hal tersebut pelaporan pertanggungjawaban sosial (*CSR*) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menyajikan pertanggungjawaban sosialnya ke dalam laporan keuangan tahunan ataupun *press releasa* lainnya (Fitria & Hartanti, 2010).

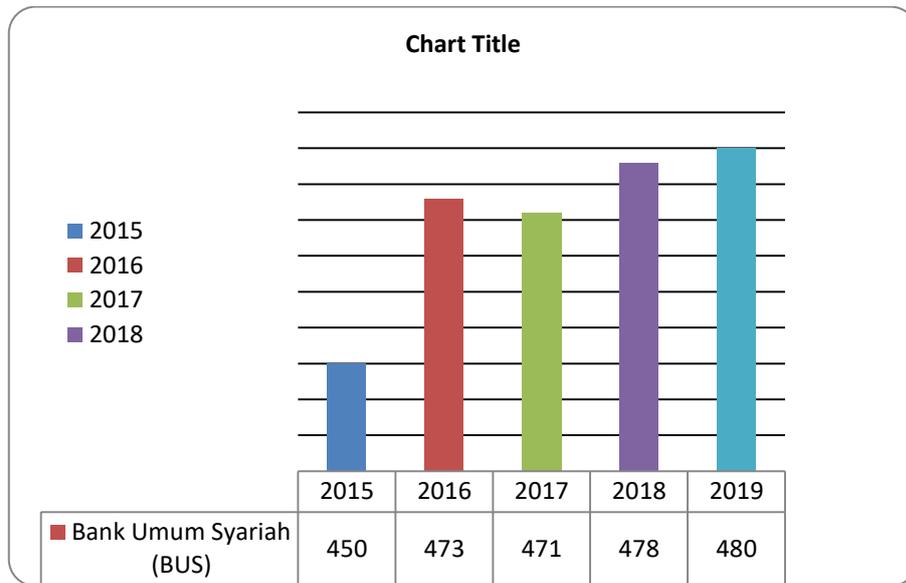
Pelaporan pertanggungjawaban sosial sekarang tidak lagi diartikan sebagai beban yang mana dengan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkannya untuk disalurkan untuk kepentingan lain, tetapi sekarang menilai pertanggungjawaban sosial sebagai sebuah investasi yang mana dengan perusahaan menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial secara baik dapat memperoleh imbal balik yakni menjadikan perusahaan mendapat citra positif, baik dari pihak internal maupun eksternal. Dengan citra positif tersebut tidak menutup kemungkinan jika perusahaan akan lebih maju karena mendapat anggapan baik dari sekitar sehingga dapat memperbaiki keuangan, menaikkan citra merk sekaligus dapat menambah daya tarik perusahaan tersebut (Zanariatini, Bayinah, & Syahroni, 2016)

Implementasi pertanggungjawaban sosial (*CSR*) tidak hanya berkembang pada lingkup konvensional, melainkan juga pada lingkup syariah. Saat ini semakin banyak perusahaan yang menerapkan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam islam kita dianjurkan untuk selalu meneladani sifat dan sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat karena beliau merupakan sebaik baik umat serta merupakan seorang utusan dari Allah SWT

untuk menyempurnakan akhlak manusia, selain itu yang paling utama dalam melakukan segala sesuatu hendaknya kita merujuk kepada Al-Qur'an al Kariim karena Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci semata melainkan Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk bagi seluruh umat manusia yang didalamnya memuat segala solusi dari permasalahan yang ada di muka bumi seperti dalam hal hukum, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Dalam islam manusia diartikan sebagai khalifah di bumi yang mana tugas manusia tidak cukup hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata (*habluminallah*) melainkan juga dibarengi dengan berlaku baik kepada makhluk hidup lainnya (*habluminannas*), pun dalam menjalankan kegiatannya baik dalam hal ekonomi, sosial dan lainnya islam mengajarkan untuk melakukannya bukan hanya berorientasi untuk kepentingan dunia saja tetapi yang terpenting adalah untuk memperoleh keridhoan-Nya.

Konsep Pertanggungjawaban sosial dalam islam erat kaitannya dengan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga yang menjalankan prinsip syariah tersebut menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatannya, salah satunya yakni pada perbankan syariah yang mana fungsi dari bank syariah sendiri yaitu sebagai perantara untuk kesejahteraan bersama dalam hal ekonomi. Saat ini perkembangan bank syariah di indonesia cukup baik, yakni dapat dilihat dalam statistik perbankan syariah (SPS) selama lima tahun terakhir pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Data Perkembangan Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2019



Sumber : (diolah sendiri dari Statistik Perbankan Syariah OJK)

Dengan semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan lembaga syariah semakin bertambah, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk terus berkembang lebih baik lagi, salah satunya dengan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dengan melaporkan pengungkapan pertanggung jawaban sosialnya.

Di Indonesia pengungkapan pada bank syariah termuat dalam PSAK No. 101 tahun 2006 tentang penyajian laporan keuangan syariah, namun PSAK ini hanya berlaku untuk laporan keuangan saja, tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, sehingga terdapat perbedaan dikarena belum adanya standar khusus dalam penyajian laporannya, baik dari tema yang diungkapkan, tingkat pengungkapan, tipe pengungkapan dan lain lain. Sehingga hal ini menjadi pemicu pemikiran tentang Pelaporan pertanggungjawaban sosial

berdasarkan nilai-nilai islam yang sering disebut dengan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Abadi, Mubarak, & Sholihah, 2020).

Konsep *ISR* pertama kali digagas oleh Ros Haniffa pada tahun 2002 yang kemudian dikembangkan oleh Othman *et al* di Malaysia. Konsep ini muncul dilatarbelakangi oleh pandangan Ros haniffa yang menyatakan bahwa adanya suatu keterbatasan dalam laporan pertanggungjawaban sosial konvensional, sehingga terbentuklah konsep *Islamic Social Reporting (ISR)* (Kurniawati & Yaya, 2017). Munculnya konsep *ISR* ini diharapkan dapat melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat islam. Instrumen tersebut dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan bisnis yang lebih jujur dan adil karena *ISR* sendiri mempunyai dua tujuan utama yakni sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Abadi, Mubarak, & Sholihah, 2020).

Indeks *ISR* berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti (Hanifa, 2002; Maali *et al*, 2006; Ousama dan Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; Othman *et al*, 2009) mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam (Fitria & Hartanti, 2010). Indeks *ISR* tersebut berisi 6 (enam) tema antara lain: investasi dan keuangan, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta tata kelola perusahaan (Sutapa & Laksito, 2018).

Dalam praktiknya, perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan kegiatannya sesuai prinsip syariah seperti pada pelaporan pertanggungjawabannya, sampai saat ini pengukuran pertanggung jawaban bank syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiativ Index* (Indeks *GRI*). Hal tersebut dapat dilihat pada laporan *sustainability* Bank Syariah Mandiri (BSM) (Awaliyah & Vestari, 2018).

Berdasarkan (Haniffa, 2002) penggunaan indeks *GRI* dalam menilai lembaga keuangan syariah kurang tepat dilakukan karena menurut alat ukur pelaporan pertanggungjawaban antara lembaga syariah dan lembaga konvensional haruslah berbeda, hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya suatu informasi yang disajikan antara persepektif syariah dan perspektif konvensional terdapat perbedaan, yang mana informasi dalam lembaga syariah tidak seluruhnya termuat dalam lembaga konvensional. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Syahputri & Surenggono, 2019) bank umum syariah yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya berdasarkan indeks *GRI* menghasilkan skor yang lebih tinggi yaitu sebesar 54,40% sedangkan menggunakan menggunakan indeks *ISR* menghasilkan skor yang lebih rendah yaitu sebesar 52,75% penelitian lain juga dilakukan oleh (Muthmainnah, Lubis, & Zamzami, 2017) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perbankan syariah dengan menggunakan indeks *GRI* menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada pengungkapan menggunakan indeks *ISR*. Hal tersebut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pelaporan pertanggungjawaban sosial berdasarkan prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Disamping fenomena tersebut terdapat beberapa bank umum syariah yang sudah mengungkapkan pelaporan pertanggungjawaban sosial berbasis syariah *Islamic Social Reporting* tetapi belum mencapai hasil yang maksimal, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2014) dengan meneliti 4 bank Umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2013, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari semua sampel belum ada yang mampu mengungkapkan sebanyak 100%, dari keseluruhan, 3 diantaranya dapat melebihi angka 50%. Penelitian lain juga telah dilakukan oleh (Andraeny, 2016) yang melakukan penelitian pada 11 bank umum syariah di Indonesia. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan menggunakan indeks *ISR* masih berada pada *rate* 35% dari total keseruhan pengungkapan. Kemudian penelitian dengan tahun terbaru dilakukan oleh (Qulub, Amin, & Junaidi, 2019), berikut prosentase pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank umum syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Pengungkapan *ISR* Bank Umum Syariah
Tahun 2016-2018

No	Bank Umum Syariah (BUS)	2016		2017		2018	
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	BMI	36	67,9%	37	69,8%	37	68,9%
2	BMSI	37	69,8%	37	69,8%	38	71,7%
3	BSM	42	79,2%	41	79,2%	40	75,5%
4	BRIS	34	64,2%	36	64,2%	38	71,7%
5	BNIS	39	73,6%	39	73,6%	40	75,5%
6	BCAS	32	60,4%	37	60,4%	38	71,7%

7	BSB	33	62,3%	33	62,3%	33	62,3%
8	BACS	37	69,8%	37	69,8%	37	69,8%
9	BVIS	28	52,8%	28	52,8%	28	52,8%
10	BPDBS	36	67,9%	35	67,9%	35	66,0%
11	BJBS	33	62,3%	33	62,3%	34	64,2%
12	BTPNS	32	60,4%	32	60,4%	32	60,4%
13	Maybank Syariah	33	62,3%	33	62,3%	33	62,3%

Sumber : (Qulub, Amin, & Junaidi, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah telah melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan indeks *ISR*, namun pengungkapan yang dilakukan dinilai masih kurang dan belum mencapai titik maksimal yaitu 100%, hal tersebut dikarenakan belum adanya standar baku yang mengatur pengungkapan pertanggungjawaban sosial berbasis syariah.

Dalam mengungkapkan *ISR* terdapat beberapa faktor faktor yang dinilai mempunyai potensi pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Faktor-Faktor tersebut terdiri dari rasio keuangan berupa *Profitabilitas* yang dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* dan *Leverage* menggunakan *Debt to Equity (DER)* kemudian juga terdapat indikator *Good Corporate Governance* berupa ukuran dewan komisaris serta ukuran dewan pengawas syariah, pemilihan *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini dikarenakan dengan pelaksanaan GCG yang baik maka akan menambah kepercayaan *stakeholder* sehinggastakeholder melakukan investasi pada lembaga

keuangan syariah yang mana hal tersebut akan meningkatkan perkembangan lembaga keuangan syariah. Peningkatan perkembangan lembaga keuangan syariah akan berdampak juga pada meningkatnya pengungkapan ISR yang mana pengungkapan ISR tersebut bertujuan untuk lebih memberikan kepercayaan kepada *stakeholder*. Salah satu faktor yang menentukan terselenggaranya GCG yang baik adalah adanya pengawasan yang baik dan juga optimal terhadap aktivitas perusahaan, tugas pengawasan tersebut dilaksanakan oleh dewan komisaris serta dewan pengawas syariah dimana dewan komisaris bertugas mengawasi seluruh aktivitas di perusahaan sedangkan dewan pengawas syariah bertugas mengawasi kegiatan agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah sehingga dipilihlah variabel dewan komisaris serta dewan pengawas syariah berdasarkan indikator GCG dalam melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan ISR. Disamping hal tersebut pemilihan keseluruhan variabel dalam penelitian ini didasari oleh perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Variabel pertama dalam penelitian ini yaitu variabel *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk melihat besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi nilai *Profitabilitas* maka menggambarkan semakin baik kemampuan untuk menghasilkan keuntungan (Fahmi, 2017). Dalam hal ini *Profitabilitas* dinilai berpengaruh karena berdasarkan Luo et. al. dalam (Cahya, Nuruddin, & Ikhsan, 2017) mengatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung mampu mengambil keputusan terhadap lingkungan sekitar, sementara

itu perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk cenderung hanya berfokus pada pencapaian tujuan keuangan serta berupaya meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Lestari, 2013) dan (Othman, Thani, & Ghani, *Determinants of Islamic Social Reporting among Top Shariah Approved Companies in Bursa Malaysia*, 2009) menyatakan bahwa variabel *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *ISR*, berbeda halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017) dan (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) yang menyatakan bahwa variabel *Profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ISR*.

Leverage juga dinilai berpengaruh dalam pengungkapan *ISR*. *Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Berdasarkan (Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung membuat perusahaan lebih sedikit melakukan pengungkapan sosialnya karena lebih memilih untuk mengembalikan utang kepada para kreditur. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh (Kalbuana & dkk, 2019) dan (Anggraini & Wulan, 2015) mengungkapkan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*, Sedangkan hasil lain diteliti oleh (Rama & Meliawati, 2014) yang menyatakan bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Pengungkapan *ISR* juga dinilai dapat dipengaruhi ukuran dewan dewan komisaris, karena dewan komisaris dinilai sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi pada perusahaan, sehingga semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka dapat dikatakan semakin baik pengendaliannya

karena meminimalisir informasi yang ditutupi termasuk dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Istifaroh & Subardjo, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati & Yaya, 2017) dan (Setiawan, 2020) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* sedangkan hasil berbeda diperoleh dalam penelitian (Hasanah, Widiyanti, & Sudarno, 2017) dengan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Ukuran dewan pengawas syariah termasuk salah satu yang dapat mempengaruhi pengungkapan *ISR* karena dewan pengawas syariah bertugas mengawasi kegiatan perusahaan agar selalu menjalankan kegiatannya dalam prinsip syariah. Sehingga seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Khoirudin, 2013) yang mana semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka pengawasan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* semakin efektif dan level pengungkapan atas hal tersebut dapat meningkat, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2016) bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*, sedangkan hasil lain yang telah diteliti oleh (Khoirudin, 2013) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.

Mengacu pada uraian diatas yang masih terdapat *gap research* dari beberapa penelitian yang telah dilakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan *Corporate Social Reporting* berdasarkan Indeks *ISR* dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan**

Komisaris Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah* berpengaruh simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah *Profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Mengetahui apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Mengetahui apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Mengetahui apakah ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Mengetahui apakah *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris* dan *Ukuran Dewan Pengawas Syariah* berpengaruh simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat penelitian

Adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah.
 - b. Memberikan tambahan informasi dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat, yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* telah banyak dilakukan sebelumnya, yang mana hal tersebut menjadi acuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Lestari, P. (2013). Determinan Pelaporan Sosial Islam pada Bank syariah : Kasus Indonesia.	Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , Umur Perusahaan, Proporsi Komisaris Independen dan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Analisis Regresi Linier Berganda	Ukuran perusahaan dan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>ISR</i> , sedangkan umur perusahaan dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
2.	Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). <i>Determinants of Islamic Social Reporting among Top Shariah Approved</i>	<i>Size</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>board composition</i> , tipe industri dan <i>Islamic Social Reporting</i>	Analisis regresi linier berganda	<i>Size</i> , <i>Profitabilitas</i> dan <i>board composition</i> berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan tipe industri bukan faktor penting untuk ketentuan <i>Islamic</i>

	<i>Companies in Bursa Malaysia</i>	<i>(ISR)</i>		<i>Social Reporting (ISR)</i>
3.	Sunarsih, U., & Ferdiansyah. (2017). <i>Determinants of the Islamic Social Reporting Disclosure</i>	<i>Sukuk, size, profit dan Islamic Social Reporting (ISR)</i>	<i>Content analysis and multiple regression equation</i>	Sukuk dan <i>profit</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan <i>size</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
4.	Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan <i>Islamic Governance Score</i> terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Ukuran perusahaan, <i>Leverage, Profitabilitas, islamic governance score</i> dan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Analisis regresi linier berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan <i>Leverage, Profitabilitas, islamic governance score</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
5.	Ramadhani, F. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Profitabilitas, Leverage</i> dan Ukuran Dewan pengawas Syariah terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Ukuran perusahaan, <i>Profitabilitas, Leverage</i> , ukuran dewan pengawas syariah dan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Analisis regresi linier berganda	Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
6.	Rama, A., & Meliawati. (2014). Analisis Determinan Pengungkapan	Ukuran bank, umur bank, <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i>	<i>Content analysis</i> dan analisis regresi linier	Ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> ,

	<i>Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia</i>		berganda	sedangkan umur bank, <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
7.	Khoirudin, A. (2013). <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah dan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Data panel	Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
8.	Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno. (2017). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, <i>likuiditas</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> dan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Analisis regresi linier berganda	Ukuran dewan komisaris dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan ukuran komite audit, <i>likuiditas</i> dan <i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
9.	Setiawan, Firman. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Tingkat Pendidikan Dewan pengawas Syariah, Keahlian Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris dan <i>Islamic Social</i>	Analisis regresi linier berganda	Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Tingkat Pendidikan Dewan pengawas Syariah, Keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .

		<i>Reporting (ISR)</i>		
10.	Anggraini & Wulan. (2015). Faktor <i>Financial-Non Financial</i> dan Tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	<i>Size Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Jenis Industri, Ukuran dewan komisaris dan Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>Size Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Jenis Industri, Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting (ISR)</i>

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian ini, persamaan tersebut terletak pada variabel X yaitu *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah* serta variabel Y yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Selain persamaan terdapat juga perbedaan antar penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, perbedaan tersebut adalah:

1. Adanya perbedaan penggunaan item-item pengungkapan dalam menghitung pengungkapan *ISR*. Dalam penelitian ini menggunakan item-item pengungkapan yang dikembangkan oleh peneliti (Abadi, Mubarok, & Sholihah, 2020).
2. Adanya perbedaan jumlah sampel yang digunakan
3. Keterbaruan waktu penelitian

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu konsep pertanggungjawaban sosial berbasis syariah yang muncul dari pemikiran peneliti yang berasal dari Malaysia bernama Ros Haniffa pada tahun 2002 yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti lain. Keberadaan konsep ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban sosial konvensional terdapat keterbatasan yang mana tidak dapat diterapkan dalam lingkup syariah (Kurniawati & Yaya, 2017).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga dalam perspektif spiritual, dan menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. *Islamic Social Reporting (ISR)* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pembuat keputusan muslim.

Kerangka konseptual *Islamic Social Reporting (ISR)* dapat diukur menggunakan suatu indeks yang bernama indeks *ISR*. Indeks ini berisi tentang item-item pengungkapan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaporan pertanggung jawaban sosial. Adapun tema-tema pengungkapan dalam indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah:

1. Keuangan dan Investasi

Informasi yang diungkapkan dalam tema ini berkaitan dengan sumber-sumber diperolehnya keuangan dan investasi, apakah sumber-sumber tersebut terbebas dari unsur *riba* dan *gharar*. *Riba* (bunga) merupakan suatu pengambilan tambahan dalam transaksi jual-beli ataupun pinjam meminjam secara bathil yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam. Pelarangan *riba* secara etika dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang merugikan pihak lain, disisi lain agar dalam bertansaksi uang digunakan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas (Nur, 2015). Larangan *riba* telah dijelaskan dalam QS. Al-Nisa : 161 sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"*

Unsur *Gharar* juga dilarang dalam islam, *gharar* dalam keuangan dapat diartikan sebagai spekulasi atau resiko. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur resiko yang mengandung keraguan dan ketidakpastian secara lebih dominan, kemudian yang kedua yaitu unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan. Secara lebih jauh, *gharar* merupakan situasi dimana mengandung informasi yang tidak rinci dan tidak lengkap dikarenakan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian atas barang yang ditransaksikan (Nur, 2015) Larangan *gharar* juga telah dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhori Muslim sebagai berikut:

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya : *"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Bukhori Muslim)*

2. Produk dan Jasa

Dalam tema ini perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh produk dan jasa yang berada dalam kategori terlarang (haram), produk dan jasa ini seperti minuman keras, perjudian dll. Dalam islam halal atau haramnya suatu produk atau jasa sangat penting untuk diungkapkan karena hal tersebut merupakan batasan antara yang hak dan yang bathil. Bagi para pemangku kepentingan, mengetahui suatu produk tersebut termasuk halal/haram merupakan suatu hal yang penting karena untuk membantu dalam pengambambilan keputusan.

3. Karyawan

Karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya karyawan perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dalam islam perlu untuk mengetahui apakah suatu perusahaan mempekerjakan karyawannya dengan baik, seperti gaji, jenis pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait hal-hal keagamaan seperti waktu dan tempat sholat, pendidikan dan dukungan pelatihan kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja (Othman & Thani, *Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia*, 2010)

4. Masyarakat

Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan tentang perannya terhadap peningkatan pembangunan ekonomi serta cara mengatasi masalah sosial yang ada, hal tersebut dapat dijalankan melalui cara *sadaqah* (sedekah), *waqaf* (amanah) dan *qardul hasan* (pinjaman tanpa keuntungan).

5. Lingkungan

Lingkungan/alam merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan, karena banyak kebutuhan manusia yang disediakan oleh alam, sehingga wajib bagi seluruh makhluk hidup untuk menjaga alam agar tetap seimbang, terlebih lagi bagi perusahaan yang dalam kegiatannya berhubungan dengan alam/lingkungan. Disisi lain islam juga telah mengajarkan untuk selalu menjaga dan memelihara alam beserta isinya, karena pada dasarnya manusia merupakan khalifah di bumi yang mana juga bertugas untuk berlaku baik kepada seluruh makhluk hidup. Dalam kegiatannya perusahaan hendaknya tidak melakukan ataupun terlibat dalam aktivitas yang didalamnya dapat merusak lingkungan, sehingga perlu pengungkapan terkait tentang penggunaan sumber daya alam serta upaya yang telah dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang.

6. Tata Kelola Perusahaan

Menurut (Hasanah S. M. & Romi, 2019) terdapat beberapa prinsip tata kelola perusahaan dalam islam, yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban organ perusahaan agar tercipta pengelolaan yang efektif di

dalamnya. Akuntabilitas dalam nilai-nilai islam dapat ditemukan dalam sifat *shiddiq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya), dengan adanya kedua sifat tersebut akan menambah kepercayaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.

2. Transparansi

Transparansi merupakan suatu pengungkapan penuh terhadap suatu informasi secara akurat, adil, dan tepat waktu. Dalam islam konsep transparansi telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ

مِنْهُ شَيْئًا ؕ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”

Berdasarkan ayat tersebut terdapat keterkaitan dengan transparansi yaitu sifat *shiddiq* (jujur), seseorang atau perusahaan harus mengungkapkan informasi

secara terbuka dan jujur apa mengenai apa yang ada didalamnya tanpa ditutup-tutupi.

3. Tanggung jawab

Dalam menjalankan aktivitasnya suatu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dikerjakan, baik dalam bertanggung jawab mematuhi segala aturan, bertanggung jawab terhadap segala yang telah dikerjakan serta bertanggung jawab terhadap semua resiko yang terjadi. Prinsip tanggung jawab dalam islam terdapat pada sifat *amanah* (dapat dipercaya) , *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (cerdas). Perusahaan membutuhkan seorang yang cerdas, sehingga jika terjadi permasalahan dalam lingkup perusahaan dapat mudah terselesaikan, disamping itu juga perlu memiliki sifat amanah dalam mengemban seluruh tugas yang diberikan serta dapat menyampaikan hal hal kebaikan yang mana dapat menuntun kearah yang lebih baik.

4. Independensi

Independensi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan prinsip serta aturan yang berlaku. Independensi dalam islam berkaitan dengan sikap *istiqomah* yang mana tetap berpegang teguh dalam kebenaran meskipun sedang dihadapkan pada hal hal sulit.

5. Keadilan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa berlaku adil terhadap semua yang terlibat didalamnya, baik dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Makna adil bukan berarti harus selalu menggunakan ukuran yang

sama, tetapi dapat dinamakan adil jika menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

2.2.2 Agency Theory

Agency Theory menggambarkan tentang hubungan antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen (*agen*). Dalam teori ini terdapat konflik keagenan antara kedua belah pihak yakni perbedaan tujuan antara *principle* dan *agen*, *principle* menghendaki untuk berupaya memaksimalkan laba sedangkan *agen* juga menghendaki mendapatkan kompensasi sesuai dengan kontrak, sehingga *agen* melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *principle* (Rokhlinasari, 2015).

Kondisi tersebut muncul dikarenakan adanya asimetri informasi, yakni ketimpangan informasi yang dimiliki antar*principle* dan *agen*. *Agen* memiliki lebih banyak informasi internal yang berkaitan dengan perusahaan dibanding dengan *principle*. Teori agensi hadir untuk mengatasi konflik keagenan, untuk memenuhi *stakeholder*, *agen* mengungkapkan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Para *stakeholder* akan puas melihat perusahaannya mengungkapkan pertanggung jawaban sosial sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dan dapat memaksimalkan laba (Putri, 2017).

2.2.3 Legitimacy Theory

Legitimacy Theory merupakan suatu teori yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat. O'Donova dalam (Omran, 2015) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan teori yang menganggap bahwa suatu

perusahaan dapat terus beroperasi serta dapat mencapai kesuksesan jika bertindak sesuai dengan batas batas serta norma yang ada dalam masyarakat. Teori legitimasi bergantung pada asumsi bahwa antara perusahaan dan masyarakat terdapat suatu kontrak sosial, yang dimaksud kontrak sosial tersebut adalah suatu cara untuk menjelaskan harapan masyarakat terhadap bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. Harapan sosial tersebut bersifat tidak tetap, namun menyesuaikan dengan perkembangan waktu sehingga suatu perusahaan harus lebih responsif terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi (Rokhlinasari, 2015).

Teori ini juga menyebutkan bahwa jika perusahaan tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan batasan serta norma yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja perusahaan, sehingga masyarakat bisa saja memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk memenuhi harapannya, atau hal lain masyarakat juga dapat menggunakan sistem hukum untuk mensyaratkan perusahaan (Mousa & Hassan, 2015). Hal tersebut mensiratkan bahwa suatu perusahaan harus selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan serta masyarakat, karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut. Agar dapat terus beroperasi, suatu perusahaan harus selalu menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankannya sesuai dengan batasan-batasan yang ada, hal tersebut dapat dicapai dengan suatu pengungkapan dalam laporan perusahaan sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah suatu perusahaan berjalan sesuai batasan atau sebaliknya.

2.2.4 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan *stakeholder*, semakin kuat *stakeholder* maka perusahaan juga harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Berdasarkan karakteristiknya *stakeholder* dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer dapat diartikan sebagai seorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern, *stakeholder* primer ini seperti investor, karyawan, pemasok dll. Sedangkan *stakeholder* sekunder merupakan mereka yang terdapat keterkaitan dengan perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung terhadap transaksi serta kelangsungannya tidak esensial (Rokhlinasari, 2015).

Teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan sebisa mungkin dapat memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Putri, 2017) . Teori ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya pengungkapan pertanggung jawaban sosial dapat dijadikan sarana untuk berdialog dengan para *stakeholder*. Dengan diungkapkannya pertanggung jawaban sosial perusahaan diharapkan keinginan *stakeholder* dapat terpenuhi sehingga menciptakan hubungan yang harmonis anatar perusahaan dengan *stakeholdernya*, yang mana hal tersebut dapat menjadi jalan untuk keberlanjutan perusahaannya .

2.2.5 *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan suatu teori yang digagas oleh Triyuwono, teori ini dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang mana memiliki karakter keseimbangan, hal tersebut menjadikan *Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak lagi hanya memperhatikan kepentingan individu (pemegang saham) tetapi juga mementingkan kepentingan pihak lain yakni *stakeholder*. Dalam konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)* *stakeholder* meliputi 3 pihak, yaitu Tuhan, manusia dan alam (Triyuwono, 2011). Tuhan merupakan *stakeholder* tertinggi karena segala sesuatu hakikatnya kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan dan merupakan satu satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan menjadi *stakeholder* tertinggi maka seluruh kegiatan dijalankan berdasarkan atas aturan serta hukum Tuhan.

Stakeholder kedua yakni manusia, dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok, yakni *direct-stakeholder* serta *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholder* yakni pihak pihak yang turut berkontribusi dalam perusahaan baik dalam hal *financial* maupun *non financial*, sedangkan *indirect-stakeholder* merupakan pihak pihak yang tidak memberi kontribusi kepada perusahaan baik dalam hal *financial* maupun *non financial*, tetapi menurut pandangan syariah tetap memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Stakeholder ketiga yakni alam, alam berperan sangat penting bagi kehidupan manusia karena alam memberikan sumberdaya yang dibutuhkan oleh manusia sehingga manusia bisa terus bertahan hidup, namun wujud kesejahteraan yang diberikan perusahaan bagi alam bukan dengan materi atau uang tetapi

dengan turut serta menjaga alam serta melindunginya dari perlakuan buruk yang dapat merusaknya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat jika teori ini tidak menempatkan manusia sebagai pemangku kepentingan utama, namun menjadikan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi diatas segalanya, karena sejatinya Tuhan lah tempat kembali.

Menurut Meutia dalam (Anwar & Rajab, 2018) menyatakan bahwa teori yang paling tepat dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan terkhusus dengan berbasis syariah seperti perbankan syariah adalah *Syariah Enterprise Theory (SET)* karena didalam *Syariah Enterprise Theory (SET)* menempatkan Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* lain sejatinya merupakan *amanah* dari Allah yang mana didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dan mengelolanya dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.

2.2.5 Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam praktiknya bank umum syariah tentu memiliki kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan tersebut dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, kegiatan tersebut meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan yang dilakukan oleh bank umum syariah pada pasal 19 ayat (1), terdapat juga beberapa kegiatan yang juga dapat dilakukan oleh bank syariah

yang mana dimuat dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, kegiatan tersebut meliputi:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam menjalankan kegiatannya bank umum syariah juga dibatasi oleh hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum syariah sesuai pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, larangan tersebut adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.2.6 *Return On Assets (ROA)*

Rasio Rasio *Return On Assets (ROA)* atau *Return on Investment (ROI)* dapat didefinisikan sebagai rasio yang berguna untuk melihat sejauh mana investasi/aset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2017).

Rasio Rasio *Return On Assets (ROA)* atau *Return on Investment (ROI)* merupakan salah satu dari empat rasio lain yang termasuk dalam rasio *Profitabilitas*, rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba sesuai dengan apa yang diharapkan, semakin tinggi nilai Rasio *Return On Assets (ROA)* maka juga menggambarkan semakin baiknya perusahaan dalam menghasilkan laba yang diharapkan.

Dalam islam profitabilitas diartikan sebagai sebuah keuntungan yang dicapai dengan tujuan atau orientasi untuk akhirat. Dalam hal ini profitabilitas memiliki dua aspek, yaitu aspek profit materi dan profit non materi. Untuk aspek profit materi sama halnya dalam konsep konvensional yaitu untuk memperoleh keuntungan, karena dalam islam juga tidak dilarang untuk mencari harta selagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan untuk aspek profit non materi adalah keberkahan dan keridhoan Allah SWT, karena kehidupan di dunia hanyalah sementara dan dimanfaatkan sebagai jalan untuk kehidupan di akhirat karena materi yang kita dapatkan tanpa adanya keberkahan dan keridhian dari Allah SWT hanya akan menjadi sebuah kesenangan sesaat di dunia dan tidak bernilai ibadah. Untuk mencapai keberkahan dan keridhian dari Allah SWT dimulai dengan bagaimana cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan Allah dan juga tetap memperhatikan kemaslahatan umat (Pratama & Jaharuddin, 2018). Hal ini juga sesuai pada QS. Al – Qashash ayat 77 :

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di*

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

2.2.7 Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut (Hantono, 2018) *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio untuk menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh utang. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan salah satu rasio yang ada dalam rasio *Leverage*, yang mana rasio *Leverage* merupakan suatu rasio yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin rendah nilai *Debt to Equity Ratio (DER)* maka dapat dikatakan semakin baik yang mana perusahaan mampu untuk menjamin seluruh utangnya.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara berapa besar utang yang dapat diambil dengan mempertimbangkan darimana sumber-sumber yang dapat digunakan untuk melunasinya, karena dengan perusahaan mempunyai utang yang terlalu tinggi menyebabkan perusahaan masuk dalam *extreme Leverage* yaitu perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2017)

Dalam islam pelaksanaan hutang-piutang diperbolehkan karena termasuk tolong menolong sesama manusia namun hal tersebut juga diikuti dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi (Cahyadi, 2014). Hutang mempunyai kedudukan tinggi dimata Nabi Muhammad SAW, yang tertuang dalam sebuah hadist yg diriwayatkan oleh imam muslim bahwa Nabi SAW berkata “*Diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang.*”

Berdasarkan hal tersebut jelas dilihat bahwa pentingnya sebuah hutang, sehingga bagi seorang muslim hendaknya dipertimbangkan antara besarnya hutang dengan penghasilan yang kita miliki serta hendaknya jika seorang muslim mempunyai hutang agar mencatatnya untuk meminimalisir sifat manusia yang mudah lupa dan juga mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat melunasi hutang tersebut, seperti pada Q.S Al-Baqarah : 232 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*

2.2.8 Ukuran Dewan Komsiaris

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut (Khoirudin, 2013) Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dalam pasal 108 UU No 40 tahun 2007 juga dijelaskan bahwa suatu perseroan yang kegiatannya menghimpun/ mengelola dana, menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka diwajibkan minimal mempunyai 2 dewan komisaris di dalamnya.

Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.
4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal ini dewan komisaris dapat diumpamakan sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan yang mana merupakan wakil yang telah diberi amanah oleh para pemegang saham. dalam Q.S Al-Mu,minun ayat 8-9 Allah SWT telah berfirman

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ ۹ - أُولَٰئِكَ هُمُ

الْوَارِثُونَ ۝ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ۱۱

Artinya : "Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mewarisi surga firdaus, mereka akan kekal didalamnya".

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin merupakan suatu amanah yang besar, hendaknya seorang pemimpin jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan, jabatan serta wewenangnya untuk hal-hal yang tidak baik dan seorang pemimpin hendaknya bisa mengemban tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selain hal tersebut seorang pemimpin dalam hal ini dewan komisaris hendaknya memiliki sifat *shiddiq* yang mana mementingkan kejujuran, sifat *fathanah* yaitu memiliki sifat bijaksana, kompeten serta berilmu dalam bidangnya dan juga memiliki sifat *tabligh* yang berarti menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran tanpa adanya hal-hal yang harus ditutup-tutupi.

2.2.9 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional no.3 tahun 2000 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah

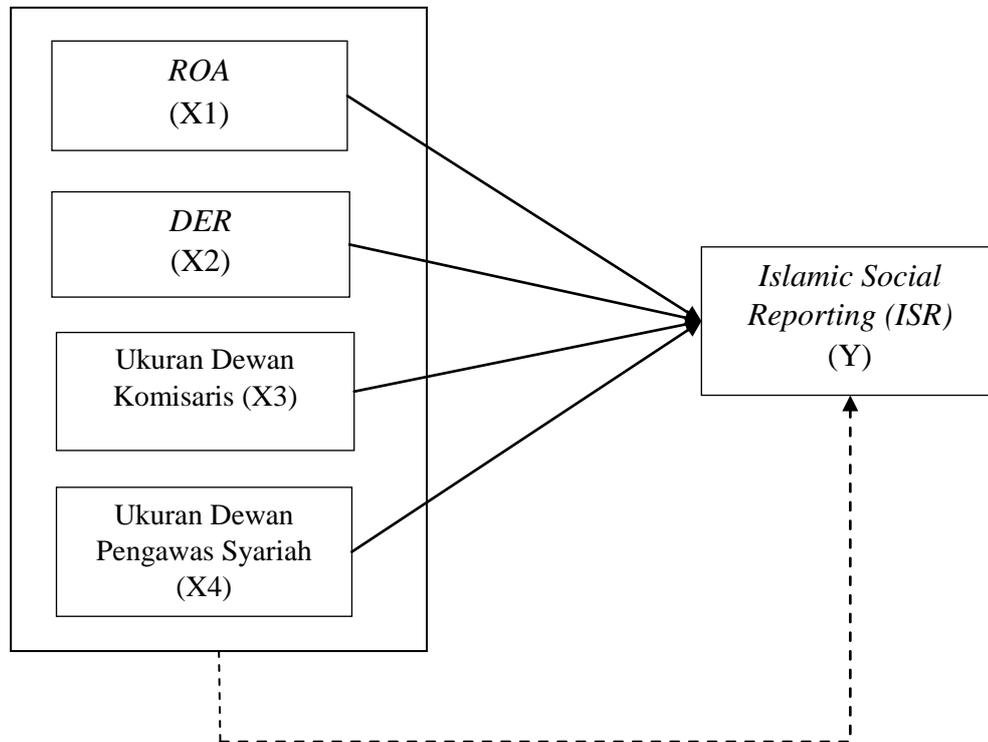
mendapat rekomendasi dari DSN. Ukuran Dewan Pengawas Syariah menurut (Khoirudin, 2013) adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan.

Dewan Pengawas syariah mempunyai tugas yang harus dijalankan, tugas tersebut adalah mendiskusikan mengenai masalah masalah serta transaksi usaha yang terjadi kemudian membuat keputusan mengenai sesuai ataupun tidaknya suatu transaksi dengan prinsip syariah (Misbach, 2015). Dalam pasal 109 UU no 40 tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun fungsi dari dari Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya
2. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan: —————> Pengaruh Parsial
-----> Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Rasio *Profitabilitas* merupakan rasio untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi, dalam hal ini rasio *Profitabilitas* diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*.

Menurut Luoet. *al.* dalam (Cahya, Nuruddin, & Ikhsan, 2017) mengatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung mampu

mengambil keputusan terhadap lingkungan sekitar, sementara itu perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk cenderung hanya berfokus pada pencapaian tujuan keuangan serta berupaya meningkatkan kinerja.

Watts *and* Zimmerman dalam (Cahya, Nuruddin, & Ikhsan, 2017) juga berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat *Profitabilitas* yang tinggi cenderung untuk mengintervensi kebijakan termasuk dalam hal pengungkapan pertanggung jawaban sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2013) dan (Othman, Thani, & Ghani, *Determinants of Islamic Social Reporting among Top Shariah Approved Companies in Bursa Malaysia*, 2009) yang mengungkapkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *Profitabilitas* yang diprosikan dengan *Return On Assets (ROA)* maka semakin baik pula tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Rasio *Leverage* merupakan rasio yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menyelesaikan seluruh utangnya, rasio ini dapat diprosikan dengan rasio *Debt to Equity (DER)* yang mana rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menyelesaikan hutangnya dengan pihak lain melalui modal sendiri.

Dalam (Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial yang tinggi pula, hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki tekanan yang besar dari debtholder sehingga perusahaan berupaya melonggarkan tekanan ini dengan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam hal ini *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalbuana & dkk, 2019) dan (Anggraini & Wulan, 2015) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Dewan komisarsi merupakan salah satu terpenting dalam suatu perusahaan karena dewan komisarsi bertugas mengawasi jalannya manajemen perusahaan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi dalam perusahaan yang dapat memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka dapat dikatakan semakin baik pengendaliannya karena meminimalisir informasi yang ditutupi termasuk dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*(Istifaroh & Subardjo, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirudin, 2013)dan (Setiawan, 2020)yang mengatakan Ukuran Dewan Komisaris

berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Salah satu hal yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah adanya dewan pengawas syariah (DPS), tugas dari dewan pengawas syariah sendiri yaitu untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran dewan pengawas syariah yang dalam hal ini didapatkan dengan menghitung jumlah dewan pengawas syariah diperkirakan dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, karena melihat tugas serta wewenang yang dijalankan oleh dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi perusahaan agar tetap berada di jalur syariah, termasuk dalam pelaporan pertanggung jawaban sosial, seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Khoirudin, 2013) yang mana semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka pengawasan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* semakin efektif dan level pengungkapan atas hal tersebut dapat meningkat. hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari (Baidok & Septiarini, 2016) dan (Rostiani & Sukanta, 2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu tahun 2017-2019.

3.3 Populasi dan sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2019.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yakni cara menentukan sampel sesuai dengan pertimbangan/kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017-2019
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasi laporan keuangan tahunan serta laporan CSR berturut-turut dari tahun 2017-2019.
3. Bank Umum Syariah yang memuat data berkaitan dengan variabel penelitian.

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
BUS yang terdaftar di OJK hingga tahun 2019	14
BUS yang tidak mempublikasi laporan keuangan atau laporan CSR	(3)
Jumlah Sampel	11

Sumber :data diolah sendiri, 2020

Tabel 3.2
Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Bank Umum Syariah	Kode
1.	PT. BCA Syariah	BCAS
2.	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	BRIS
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
4.	PT. Bank Mega Syariah	BMS

5.	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
6.	PT. Maybank Syariah Indonesia	BMSI
7.	PT. BNI Syariah	BNIS
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	
9.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
10.	PT. Bank Aceh Syariah	
11.	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMIS

Sumber :data diolah sendiri, 2020

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sekunder yang mana menurut (Hardani dkk, 2020) Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh tidak dari sumber langsung melainkan berasal dari tangan kedua seperti dari laporan keuangan, pustaka, ataupun dokumen-dokumen lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain rasio keuangan perusahaan, ukuran dewan komisaris serta ukuran dewan pengawas syariah dalam laporan tahunan masing masing Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian melalui website Otoritas jasa keuangan (OJK) serta melakukan penelaahan terhadap informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pada website masing masing bank umum syariah.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen (X)			
1	<i>Return On Assets (X₁)</i>	Rasio ini dapat diukur dengan rumus (Fahmi, 2017) : $ROA = \frac{Earning\ After\ Tax\ (EAT)}{Total\ Assets} \times 100\%$	Rasio
2	<i>Debt to Equity (X₂)</i>	Rasio ini dapat diukur dengan rumus (Hantono, 2018): $DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal\ Sendiri} \times 100\%$	Rasio
3	Ukuran Dewan Komisaris	Variabel ini dapat diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris pada laporan keuangan tahunan masing-masing bank (Khoirudin, 2013)	Nominal
4	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Variabel ini dapat diukur dengan menghitung jumlah dewan pengawas syariah pada laporan keuangan tahunan masing-masing bank (Khoirudin, 2013)	Nominal
Variabel Dependen (Y)			
5	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Variabel ini dapat diukur dengan rumus: $ISR = \frac{jumlah\ item\ pengungkapan}{jumlah\ item\ maksimum}$	Rasio

Item item yang digunakan dalam menilai pengungkapan *ISR* menggunakan item yang telah dikembangkan oleh (Abadi, Mubarak, & Sholihah, 2020), item-item tersebut antara lain:

Tabel 3.4
Item-Item pengungkapan *ISR*

NO	ITEM PENGUNGKAPAN	SKOR	SUMBER
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	6	
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	Othman <i>et al</i> (2009)
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	Haniffa dan Hudaib (2007)

C	TEMA KARYAWAN	13	
10	Jumlah Karyawan	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
11	Jam Kerja	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
12	Hari Libur	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
13	Tunjangan Karyawan	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
14	Kebijakan Remunerasi	1	Othman <i>et al</i> (2009)
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	Othman <i>et al</i> (2009)
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	Othman <i>et al</i> (2009)
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	Othman <i>et al</i> (2009)
20	Tempat ibadah yang memadai	1	Othman <i>et al</i> (2009)
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	1	Othman <i>et al</i> (2009)
22	Kesejahteraan karyawan	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
D	TEMA MASYARAKAT	11	
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	1	Haniffa (2002)
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	Haniffa (2002)
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	Othman <i>et al</i> (2009)

27	Pemberian beasiswa sekolah	1	Othman <i>et al</i> (2009)
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
29	Pengembangan generasi muda	1	Othman <i>et al</i> (2009)
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	Othman <i>et al</i> (2009)
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	Othman <i>et al</i> (2009)
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	Haniffa dan Hudaib (2007) dan Othman <i>et al</i> (2009)
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
E	TEMA LINGKUNGAN	5	
34	Konservasi lingkungan hidup	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009)
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	1	Haniffa dan Hudaib (2007)
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	1	Othman <i>et al</i> (2009)
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	22	
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
40	Pendapatan dan penggunaan	1	SEBI No 12/13/DPbs

	dana non halal		(2010)
41	Struktur kepemilikan saham	1	Othman <i>et al</i> (2009)
42	Kebijakan anti korupsi	1	Othman <i>et al</i> (2009)
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	POJK No. 12/POJK.01/2017
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	POJK No. 55/POJK.03/2016
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	POJK No. 13/POJK.03/2017
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	1	PBI No. 19/5/PBI/2017
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	1	SEOJK No. 16/SEOJK.03/2017
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	POJK No. 18/POJK.03/2017
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	PBI No. 19/8/PBI/2017
50	Pemblokiran dana nasabah	1	SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017
51	Perkara hukum	1	Othman <i>et al</i> (2009)
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	Othman <i>et al</i> (2009)
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
54	Remunerasi dewan komisaris	1	Othman <i>et al</i> (2009)
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	Othman <i>et al</i> (2009)
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman <i>et al</i> (2009)

57	Remunerasi dewan direksi	1	Othman <i>et al</i> (2009)
58	Rincian nama dan profil DPS	1	Othman <i>et al</i> (2009)
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	Othman <i>et al</i> (2009)
60	Remunerasi DPS	1	Othman <i>et al</i> (2009)
	TOTAL	60	

Sumber : (Abadi, Mubarak, & Sholihah, 2020)

3.7.1 Return On Total Assets (ROA)

Return on Total Asset (ROA) atau bisa disebut *Return On Investment (ROI)* adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi atau aset yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2017)

3.7.2 Debt to Equity (DER)

Dalam (Hantono, 2018) disebutkan *Debt to Equity (DER)* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri bisa menjamin seluruh utang

3.7.3 Ukuran Dewan Komisaris

Menurut (Khoirudin, 2013) Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan

3.7.8 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013).

3.8 Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu data yang telah terkumpul sesuai dengan data yang ada yang kemudian diolah dengan sebagaimana mestinya yang mana hasil dari pengolahan tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk angka tetapi tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Siyoto & Sodik, 2015)

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat sebaran suatu data berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk uji *One-SampelKolmogorov-Smirof* menurut Ghozali (2010) dalam (Faridah, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Apabila hasil 1-Sampel-KS $> 0,05$, maka pola berdistribusi normal
2. Apabila hasil 1-Sampel-KS $< 0,05$, maka pola tidak berdistribusi normal

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Jika suatu model regresi terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya maka menjadikan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat menjadi terganggu. Untuk melihat adanya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Dasar

pengambilan keputusan uji multikolinieritas berdasarkan(Ganar, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas
2. Apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi gejala multikolinearitas

3.8.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Suatu model regresi tidak boleh terdapat korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi dapat diukur dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Pengambilan keputusan *Durbin-Watson* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ((Napitupulu, 2017) :

1. Jika angka D-W di bawah -2, maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika angka D-W di atas +2, maka terjadi autokorelasi negative
3. Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, maka tidak terjadi autokorelasi

3.8.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak muncul heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Park (*Park test*).

Dasar pengambilan keputusan Uji Park adalah dengan melihat nilai signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Marzuki & Akhyar, 2019).

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel bebas (X), namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier (Hasan, 2016). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>
a, b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Koefisien Regresi
X ₁	= <i>Profitabilitas</i>
X ₂	= <i>Leverage</i>
X ₃	= Ukuran Dewan Komisaris
X ₄	= Ukuran Dewan Pengawas Syariah
E	= <i>error</i>

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Hasil uji t dapat dilihat melalui tabel *Coefficients* pada kolom sig. dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.
2. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

3.8.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel bebas secara bersama-sama (simultan) dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji F dapat dilihat melalui tabel ANOVA dalam kolom sig. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.
2. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3.8.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip islam. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berturut-turut pada tahun 2017-2019. Saat ini jumlah Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia sebanyak 14 bank namun setelah dilakukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka menghasilkan sampel sebanyak 11 bank, yang mana 3 bank dari total 14 bank tidak memenuhi kriteria untuk selanjutnya dilakukan penelitian. Adapun 11 bank umum syariah yang lolos kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Sampel

No	Nama Bank Umum Syariah	Kode
1.	PT. BCA Syariah	BCAS
2.	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	BRIS
3.	PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
4.	PT. Bank Mega Syariah	BMS

5.	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
6.	PT. Maybank Syariah Indonesia	BMSI
7.	PT. BNI Syariah	BNIS
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	
9.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
10.	PT. Bank Aceh Syariah	
11.	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMIS

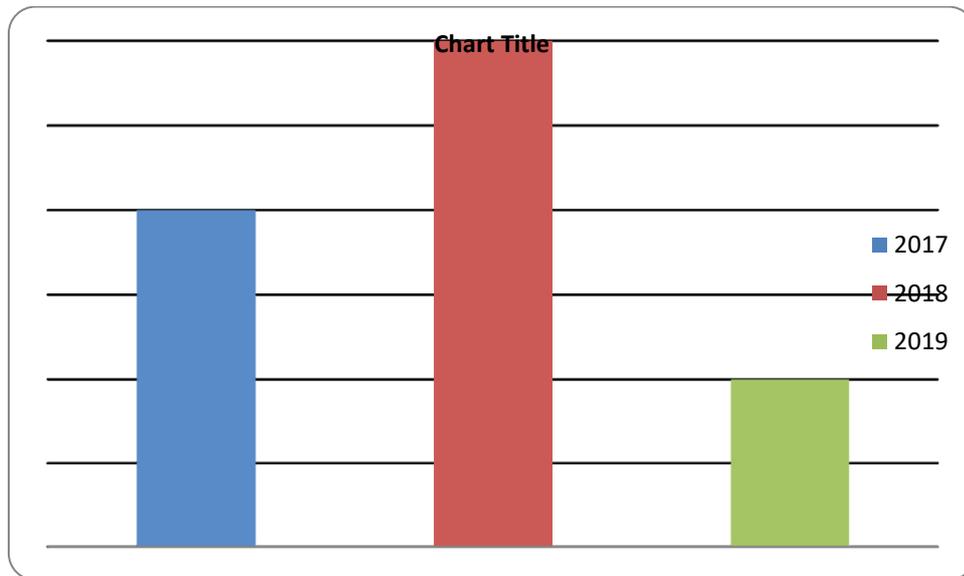
Sumber : data diolah oleh peneliti tahun 2021

Berdasarkan hasil purposive sampling diatas data penelitian yang diperoleh berjumlah 33 sampel karena 11 objek pengamatan diteliti selama 3 tahun. Sampel tersebut kemudian akan diuji terkait Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

4.1.2 Hasil Analisa *Content Analysis*

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat diperoleh melalui *content analysis* pada laporan keuangan tahunan bank umum syariah, hasil *content analysis* pada 11 bank umum syariah dalam kurun waktu 2017-2019 diungkapkan pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tingkat Pengungkapan ISR



Sumber: data diolah peneliti tahun 2021

Berdasarkan Gambar 4.1 pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syariah (BUS) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan, dari tahun 2017 menuju tahun 2018 terdapat peningkatan pengungkapan sebanyak 1% yaitu dari 72% menjadi 73%, sedangkan pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2% yang mulanya sebesar 73% turun menjadi 71%.

Dalam praktiknya, pengungkapan pertanggung jawaban sosial berbasis syariah yang dilakukan oleh bank syariah mendapatkan hasil yang beragam karena belum adanya standar baku untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial berdasarkan prinsip syariah sehingga terdapat bank yang mengungkapkannya dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Hasil skoring pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank umum syariah pada tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Skor PengungkapanISR

NO	2017		2018		2019	
	BUS	SKOR	BUS	SKOR	BUS	SKOR
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	52	PT. Bank Muamalat Indonesia	51	PT. Bank Muamalat Indonesia	54
2	PT. BNI Syariah	49	PT. Bank Syariah Mandiri	48	PT. Bank Syariah Mandiri	48
3	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	44	PT. BNI Syariah	46	PT. Bank Panin Dubai Syariah	45
4	PT. Bank Mega Syariah	44	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	45	PT. BCA Syariah	45
5	PT. Bank Panin Dubai Syariah	44	PT. Bank Panin Dubai Syariah	45	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	43
6	PT. Bank	43	PT. BCA	44	PT. Bank Aceh	42

	Syariah Mandiri		Syariah		Syariah	
7	PT. BCA Syariah	40	PT. Bank Mega Syariah	44	PT. Bank Mega Syariah	41
8	PT. Bank Aceh Syariah	40	PT. Bank Jabar Banten Syariah	42	PT. BNI Syariah	40
9	PT. Bank Syariah Bukopin	39	PT. Bank Aceh Syariah	41	PT. Bank Syariah Bukopin	39
10	PT. Maybank Syariah Indonesia	39	PT. Bank Syariah Bukopin	39	PT. Bank Jabar Banten Syariah	38
11	PT. Bank Jabar Banten Syariah	38	PT. Maybank Syariah Indonesia	39	PT. Maybank Syariah Indonesia	32
	Rata-Rata skor ISR	43		44		42

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2021

Dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor tertinggi pengungkapan *islamic social reporting* pada tahun 2017-2019 di duduki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia yakni dengan skor berturut turut sebesar 52, 51 dan 54. Sedangkan skor pengungkapan terendah pada tahun 2017 adalah PT. Bank Jabar Banten Syariah

yakni sebesar 38, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 skor terendah berasal PT. Maybank Syariah Indonesia yaitu skor berturut-turut sebesar 39 dan 32. Menurut (Ali, 2014) dalam Raditya (2012:65) mengungkapkan bahwa skor pengungkapan ISR yang rendah bukan serta merta dapat dikatakan bahwa bank umum syariah tersebut tidak mengungkapkan pertanggungjawaban sosial dengan baik, melainkan terdapat dua kemungkinan, yang pertama bank tersebut melakukan tanggungjawab sosial secara syariah tetapi tidak mengungkapkannya pada laporan keuangan tahunannya, sedangkan kemungkinan yang kedua yakni bank tersebut memang tidak melakukan tanggungjawab sosialnya dengan baik.

4.1.3 Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PROFITABILITAS (X1)	33	-,11227	,01917	,0005079	,02317397
LEVERAGE (X2)	33	,20	3,50	1,4797	,81160
UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	33	3	5	3,52	,667
UKURAN DPS (X4)	33	2	3	2,24	,435
ISR (Y)	33	,53	,90	,7185	,07694
Valid N (listwise)	33				

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. hasil analisis deskriptif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syariah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,53 yang berarti bahwa

nilai pengungkapan ISR paling rendah dari seluruh sampel yaitu sebesar 0,53 oleh PT. Maybank Syariah Indonesia pada pengungkapan tahun 2019, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,90 yang berarti bahwa pengungkapan paling tinggi dari seluruh sampel yaitu sebesar 0,90 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada pengungkapan tahun 2019. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata pengungkapan ISR oleh bank umum syariah yaitu sebesar 0,7185 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan sebaran data ISR yaitu sebesar 0,07694.

2. Hasil analisis deskriptif pada variabel *Return on Asset* (X1) menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar -0,11227 yang artinya nilai variabel *Return on Asset* (X1) paling rendah dari seluruh sampel sebesar -0,11227 oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 dan memperoleh nilai maksimum sebesar 0,01917 yang artinya nilai variabel *Return on Asset* (X1) paling tinggi dari seluruh sampel sebesar 0,01917 oleh PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2017. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata variabel *Return on Asset* (X1) yaitu sebesar 0,0005079 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan sebaran data yaitu sebesar 0,02317397.
3. Hasil analisis deskriptif pada variabel *Debt to Equity* (X2) menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,20 yang artinya nilai variabel *Debt to Equity* (X2) paling rendah dari seluruh sampel sebesar 0,20 oleh PT. Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2019 dan memperoleh nilai maksimum sebesar 3,50 yang artinya nilai variabel *Debt*

to Equity (X2) paling tinggi dari seluruh sampel sebesar 3,50 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2017. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata variabel *Debt to Equity* (X2) yaitu sebesar 1,4797 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan sebaran data yaitu sebesar 0,81160.

4. Hasil analisis deskriptif pada variabel Ukuran Dewan Komisaris(X3) menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 3 yang artinya jumlah Dewan Komisaris yang paling rendah dari seluruh sampel sebesar 3 oleh PT. BCA Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah PT. Bank Aceh Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2017-2019 dan PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019. Uji deskriptif juga menunjukkan nilai maksimum sebesar 5 yang artinya nilai Ukuran Dewan Komisaris(X3) paling tinggi dari seluruh sampel sebesar 5 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata variabel Ukuran Dewan Komisaris(X3) yaitu sebesar 3,52 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan sebaran data yaitu sebesar 0,667.
5. Hasil analisis deskriptif pada variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah(X4) menunjukkan bahwa nilai minimum yang diperoleh sebesar 2 yang artinya jumlah Dewan Pengawas Syariah yang paling rendah dari seluruh sampel sebesar 2 yakni oleh PT. BCA Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin,

PT. BNI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2017-2019 dan PT. Bank Muammalat Indonesia pada tahun 2019. Uji deskriptif juga menunjukkan nilai maksimum sebesar 3 yang artinya nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah(X4) paling tinggi dari seluruh sampel sebesar 3 oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017-2019 dan PT. Bank Muammalat Indonesia pada tahun 2017-2018. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah(X4) yaitu sebesar 2,24 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan sebaran data yaitu sebesar 0,435.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov* yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi telah berdistribusi normal atau tidak.. Dasar penilaian uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai *1-Sampel-KS* bernilai lebih dari 0,05 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas dengan One-Sampel kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized
		Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

	Std. Deviation	,05657546
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,103
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 yang mana diatas nilai signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual telah berdistribusi normal.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik hendaknya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Suatu model terbebas dari gejala multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berikut hasil Uji Multikolinieritas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA (X1)	,875	1,143

DER (X2)	,462	2,167
UKURAN DEWAN	,425	2,350
KOMISARIS (X3)		
UKURAN DPS (X4)	,875	1,143

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen yakni Return On Asset, Debt to Equity, Ukuran Dewan komisaris serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah lebih dari 0,10 sedangkan nilai VIF seluruh variabel bebas kurang dari 10. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas karena nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) dasar keputusan Uji Durbin-Watson pada penelitian ini yaitu :

1. Jika angka D-W di bawah -2, maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika angka D-W di atas +2, maka terjadi autokorelasi negative
3. Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, maka tidak terjadi autokorelasi

Berikut hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,678 ^a	,459	,382	,06048	1,466

a. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), PROFITABILITAS (X1), LEVERAGE (X2), UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)

b. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil Durbin-Watson sebesar 1,466. Hasil tersebut memenuhi kriteria 3 yang mana hasil durbin watson sebesar 1,466 berada diantara angka -2 sampai dengan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan uji park yaitu dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil Uji Park dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah :

Tabel 4.7

Hail Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,871	3,131		-3,152	,004
	PROFITABILITAS (X1)	-28,212	20,797	-,256	-1,357	,186
	LEVERAGE (X2)	-1,468	,818	-,467	-1,796	,083
	UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	1,386	1,036	,362	1,338	,192

UKURAN DPS (X4)	,016	1,108	,003	,014	,989
-----------------	------	-------	------	------	------

a. Dependent Variable: LNRES_2

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen yakni *Return On Asset*, *Debt to Equity*, Ukuran Dewan komisaris serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk melihat arah hubungan antara variabel independen yang meliputi *Return On Asset*, *Debt to Equity*, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Adapun hasil analisis Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,425	,074		5,724	,000
	PROFITABILITAS (X1)	-,176	,493	-,053	-,357	,724
	LEVERAGE (X2)	-,009	,019	-,097	-,475	,638
	UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	,086	,025	,742	3,481	,002
	UKURAN DPS (X4)	,003	,026	,016	,110	,913

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Analisis Regresi Linier berganda diatas menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,422 - 0,180X_1 - 0,008X_2 + 0,085X_3 + 0,003X_4 + e$$

Keterangan:

Y = *Islamic Social Reporting*

X₁ = *Return On Asset (ROA)*

X₂ = *Debt to Equity (DER)*

X₃ = Ukuran Dewan Komisaris

X₄ = Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linier berganda diatas terdapat koefisien yang menunjukkan hasil positif dan negatif, maka dari hasil tersebut dapat diambil interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 0,425 yang artinya jika tidak terdapat nilai pada variabel independen yang meliputi *Return on Asset*, *Debt to Equity*, Ukuran Dewan Komisaris serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah maka nilai dari *Islamic Social Reporting* adalah sebesar 0,425.
2. Nilai koefisien *Return On Asset* (X₁) adalah sebesar -0,176. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel *Return On Asset* akan berakibat pada penurunan nilai *Islamic Social Reporting* sebesar 0,176.
3. Nilai Koefisien *Debt to Equity*(X₂) adalah sebesar -0,009 yang berrati bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel *Debt to Equity* maka akan berakibat pada penurunan *Islamic Social Reporting* sebesar 0,009.

4. Nilai koefisien Ukuran Dewan Komisaris (X3) adalah sebesar 0,086. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu variabel Ukuran Dewan Komisaris maka akan berakibat pada peningkatan *Islamic Social Reporting* sebesar 0,086.
5. Nilai koefisien Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X4) adalah sebesar 0,003 yang berarti bahwa setiap peningkatan satu variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah maka akan berakibat pada peningkatan *Islamic Social Reporting* sebesar 0,003.

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengukuran Uji T apabila nilai sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T dapat dilihat pada Tabel 4.9 dibawah:

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial(Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,425	,074		5,724	,000
	PROFITABILITAS (X1)	-,176	,493	-,053	-,357	,724
	LEVERAGE (X2)	-,009	,019	-,097	-,475	,638
	UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	,086	,025	,742	3,481	,002
	UKURAN DPS (X4)	,003	,026	,016	,110	,913

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 maka hasil Uji T dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas (*ROA*) terhadap *Islamic Social Reporting*

H_1 = Profitabilitas (*ROA*) berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan Uji T (Parsial) antara variabel *Return On Asset* terhadap *Islamic Social Reporting* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *Return On Asset* sebesar 0,724. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,724 > 0,05$) yang berarti variabel *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

2. Pengaruh Leverage (*DER*) terhadap *Islamic Social Reporting*

H_2 = Leverage (*DER*) berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan Uji T (Parsial) antara variabel *Debt to Equity* terhadap *Islamic Social Reporting* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *Debt to Equity* sebesar 0,638. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,638 > 0,05$) yang berarti variabel *Debt to Equity* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting*

H_3 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan Uji T (Parsial) antara variabel Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi

variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,002 < 0,05$) yang berarti variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

4. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting*

H_4 = Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan Uji T (Parsial) antara variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,913. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,913 > 0,05$) yang berarti variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

4.1.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara bersama-sama (simultan) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengukuran uji F apabila nilai sig. $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hail Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,087	4	,022	5,946	,001 ^b
	Residual	,102	28	,004		
	Total	,189	32			

a. Dependent Variable: ISR (Y)

b. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), PROFITABILITAS (X1), LEVERAGE (X2), UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 0,001, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% ($0,001 < 0,005$) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Asset, Debt to Equity, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

4.1.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien determinasi (R²) digunakan mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil Uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,678 ^a	,459	,382	,06048	1,466

a. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), PROFITABILITAS (X1), LEVERAGE (X2), UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)

b. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,382, yang mengandung arti bahwa kemampuan variabel independen yang dalam hal ini meliputi *Return On Asset*, *Debt to Equity*, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah dalam menjelaskan variabel dependen yakni *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah sebesar 38,2%, sedangkan sisanya sebesar 61,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Tingkat pengungkapan informasi sosial berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* yang dilakukan oleh bank umum syariah dalam kurun waktu 2017-2019. Pada tahun 2017 menuju tahun 2018 bank umum syariah mengalami peningkatan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, sedangkan pada tahun 2018 menuju tahun 2019 mengalami hal yang sebaliknya, yaitu penurunan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial bank umum syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal masing-masing bank sehingga terdapat bank yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya dengan baik dan begitupula sebaliknya yang mana mengakibatkan pelaporan pertanggungjawaban sosial tersebut tidak seragam. Disisi lain hal yang mengakibatkan ketidakseragaman pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya standar baku yang

mengatur tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial berbasis syariah yang artinya pengungkapan ini masih bersifat sukarela sehingga banyak ditemukan ketidakseragaman dalam pengungkapannya.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa hasil skor tertinggi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari tahun 2017-2019 diraih oleh PT. Bank Muamalat Indonesia dengan skor berturut turut 52,51 dan 54, sedangkan hasil skor terendah tahun 2017 yaitu pada PT. Maybank Syariah Indonesia sebesar 39, sedangkan tahun 2018 pada PT. Bank Bukopin Syariah yaitu dengan skor 39 dan yang terakhir pada tahun 2019 pada PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan skor 38. Kemudian dari Tabel 4.2 berdasarkan hasil uji deskriptif diketahui bahwa nilai terendah pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu sebesar 0,53 oleh PT. Maybank Syariah Indonesia pada pengungkapan tahun 2019, sedangkan nilai tertinggi pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu sebesar 0,90 oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada pengungkapan tahun 2019, dari hasil tersebut juga diketahui bahwa rata-rata pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu sebesar 71,8%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat Bank umum syariah yang telah mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya meskipun belum mencapai maksimal, tetapi pengungkapan tersebut sudah lebih baik daripada penelitian tahun sebelumnya oleh (Wardani & Sari, 2018) yang mendapatkan nilai rata-rata pengungkapan sebesar 67,6 % pada kurun waktu 2014-2016.

4.2.2 Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara parsial terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada bank umum syariah di Indonesia

4.2.2.1 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap pengungkapan ISR

Berdasarkan hasil Hipotesis menggunakan Uji T pada tabel 4.9 mengungkapkan bahwa variabel *Profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return On Asset* dengan nilai sebesar $0,724 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis pertama yang menyatakan *Profitabilitas* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) , (Sunarsih & Ferdiyansyah, 2017) dan (Ramadhani, 2016) yang menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan (Haniffa, 2002) menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dikarenakan dalam pandangan islam perusahaan yang memang benar-benar berniat untuk melakukan pertanggungjawaban sosial tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas tinggi ataupun rendah, atau dengan kata lain tidak mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dalam keadaan untung ataupun rugi, karena perusahaan memandang bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan suatu kebutuhan yang mana digunakan sebagai wujud transparansi perusahaan untuk menambah kepercayaan dan nilai perusahaan dimata para stakeholder. Dalam

Syariah Enterprise Theory (SET) juga disebutkan bahwa sumber daya yang dimiliki *stakeholder* lain merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah, sedangkan amanah utama yaitu kepada Allah yang mana setiap perusahaan hendaknya menggunakan, mengelola serta mempertanggungjawabkan hal tersebut sebaik mungkin berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Lestari, 2013), (Cahaya, Nuruddin, & Ikhsan, 2017) dan (Othman & Thani, *Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia*, 2010) yang menyatakan perusahaan dengan tingkat *Profitabilitas* yang tinggi cenderung lebih meningkatkan pelaporan pertanggungjawaban sosialnya. Hasil ini juga bertolak belakang dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa kinerja ekonomi berhubungan positif terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial, yang mana dalam hal ini berdasarkan teori agensi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang tinggi pula.

Menurut (Watts dan Zimmerman, 1986) dalam (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti promosi jabatan, kompensasi dan hal lain. Namun dalam hal ini sejatinya pertanggungjawaban sosial bukan merupakan suatu alat yang digunakan untuk kepentingan tertentu, terlebih untuk kepentingan pribadi, melainkan adanya pertanggungjawaban sosial ini digunakan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi kepada para *stakeholder* agar bisa memantau kondisi perusahaan yang sebenarnya, apakah sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

4.2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan ISR

Berdasarkan hasil Hipotesis menggunakan Uji T pada tabel 4.9 mengungkapkan bahwa variabel *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity* dengan nilai sebesar $0,638 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis kedua yang menyatakan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rostiani & Sukanta, 2018) dan (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan (Rostiani & Sukanta, 2018) tidak berpengaruhnya leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* disebabkan karena *Leverage* yang diukur dengan total kewajiban dibagi dengan ekuitas pada bank umum syariah berbeda dengan entitas lain (non syariah) . Bagi bank syariah, kewajiban merupakan sumber utama penghasilan laba yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, sedangkan untuk entitas lain (non syariah) kewajiban merupakan suatu suntikan modal yang dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2016) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat

Leverage yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak, hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi memiliki banyak tekanan dari *debtholder* sehingga salah satu cara untuk melonggarkan tekanan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan yang lebih banyak agar diperoleh kepercayaan dari *stakeholder*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa kinerja ekonomi berhubungan positif terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial, yang mana dalam hal ini berdasarkan teori agensi perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang tinggi pula. Tidak sesuai teori agensi dalam penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan antara entitas syariah dan non syariah dalam hal kewajiban, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting*.

4.2.2.3 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR

Berdasarkan hasil Hipotesis menggunakan Uji T pada tabel 4.9 mengungkapkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris dengan nilai sebesar $0,002 < 0,05$ berpengaruh signifikan positif terhadap *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khoirudin, 2013) dan (Kurniawati &

Yaya, 2017) yang menyatakan bahwa banyak sedikitnya dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khoirudin, 2013) dan (Kurniawati & Yaya, 2017) yang mana dijelaskan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengawasan akan semakin baik pula, karena kedudukan dewan komisaris dalam perusahaan sangat penting yang mana dewan komisaris bertugas mengawasi secara keseluruhan jalannya kegiatan, kemudian memantau dan juga mengevaluasi sehingga dengan power yang dimiliki maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Baidok & Septiarini, 2016) dan (Enggaryanti & Ardini, 2018) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dewan komisaris tidak selalu menetap, cenderung pasif dan tidak dapat memantau secara langsung sehingga kurang mendukung pengungkapan pelaporan pertanggungjawaban sosialnya, dalam hal ini *Islamic Social Reporting*.

4.2.2.4 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR

Berdasarkan hasil Hipotesis menggunakan Uji T pada tabel 4.9 mengungkapkan bahwa variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan nilai sebesar $0,913 > 0,05$ tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Islamic Social Reporting* sehingga hipotesis keempat yang menyatakan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Herawati, Rawi, &

Destiana, 2019), dan (Inuzula, Basri, & Shabri, 2015) yang menyatakan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan pengawas syariah pada perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan (Inuzula, Basri, & Shabri, 2015) tidak berpengaruhnya ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* disebabkan karena Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pengungkapan ISR. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tugas, pokok dan fungsinya dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 dan DSN MUI No. Kep98/MUI/III/2001. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bahwa tupoksi dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah hanya terbatas pada kesesuaian produk atau akad yang berlandaskan pada prinsip syariah, tidak terlibat secara langsung berkaitan dengan keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sehingga banyak sedikitnya anggota dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Baidok & Septiarini, 2016) dan (Ramadhani, 2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya dewan pengawas syariah yang lebih banyak dapat memberikan masukan masukan kepada manajemen dalam hal penyaluran dana sehingga pengungkapan ISR akan lebih luas

4.2.3 Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa variabel pengungkapan *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal tersebut menunjukkan bahwaterjadi perubahan secara signifikan pada *Islamic Social Reporting (ISR)* apabila *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah mengalami perubahan secara bersama-sama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Profitabilitas* diproksikan dengan ROA, *Leverage* diproksikan dengan DER, ukuran dewan komisaris diidentifikasi dengan jumlah dewan komisaris, serta ukuran dewan pengawas syariah diidentifikasi dengan jumlah dewan pengawas syariah.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel pada 11 BUS selama 3 tahun (2017-2019). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Profitabilitas* yang diproksikan dengan *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *Profitabilitas* tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* karena perusahaan yang berniat melakukan pengungkapan tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan dalam keadaan untung ataupun rugi.
2. Variabel *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya

Leverage tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* karena adanya perbedaan pengukuran akun kewajiban antara entitas syariah dan non syariah.

3. Variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
4. Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya Dewan Pengawas Syariah tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* karena tugas Dewan Pengawas Syariah terbatas pada kesesuaian akad/produk berdasarkan prinsip syariah dan tidak terlibat langsung terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.
5. Variabel *Return On Asset, Debt to Equity*, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting (ISR)* akan mengalami perubahan secara signifikan apabila semua variabel independen mengalami perubahan secara bersama-sama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu yang lebih lama seperti 5 tahun atau lebih agar dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dapat menambah variabel independen yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang memungkinkan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan item-item pengungkapan ISR dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik yang ada di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Karim dan terjemahan.

Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi *Islamic Social Reporting Index* sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman* .

Andraeny, D. (2016). Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan: Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia. *EKA CIDA* .

Anggraini, A., & Wulan, M. (2015). Faktor Financial-Non Financial dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* .

Anwar, S. M., & Rajab, N. A. (2018). Analisis Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Manajemen* .

Awaliyah, M., & Vestari, M. (2018). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah di Indonesia. *Magisma* .

Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* .

Cahya, B. T., Nuruddin, A., & Ikhsan, A. (2017). *Islamic Social Reporting: From the Perspectives of Corporate Governance Strength, Media Exposure and the Characteristics of Sharia Based Companies in Indonesia and its Impact On Firm Value*. *Journal Of Humanities and Social Science* .

Eksandy, A., & Hakim, M. Z. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Seminar Nasional and the 4th Call of Syariah Paper* .

Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fauziah, K., & J., P. Y. (2013). Analisis Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*. *Jurnal Dinamika Akuntansi* .

- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung jawab sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks. *SNA XIII* .
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure : an Islamic Perspective. *Indonesian Manajement and Accounting Research* .
- Hantono. (2018). *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasan, M. I. (2016). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno. (2017). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* .
- Hasanah, S. M., & R. K. (2019). Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. *Iqtishaduna* .
- Istifaroh, A., & Subardjo, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* .
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* , 228.
- Kurniawati, M., & Yaya, R. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* .
- Lestari, P. (2013). Determinan Pelaporan Sosial Islam pada Bank syariah : Kasus Indonesia. *Jurnal Internasional Penemuan Bisnis dan Manajemen* .
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Manajemen Ide dan Inspirasi* .
- Mousa, G. A., & Hassan, N. T. (2015). Legitimacy Theory and Environmental Practices : Short Notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis* .

- Muthmainnah, Lubis, T. A., & Zamzami. (2017). Studi Perbandingan : Pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan General Report Initiative Index dan Islamic Social Responsibility Index. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja* .
- Omran, M. A. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure : A Critical Review. *International Journal of Accounting and Financing Reporting* .
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). *Islamic Social Reporting* of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research* .
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of *Islamic Social Reporting* among Top Shariah Approved Companies in Bursa Malaysia. *Journal of International Studies* .
- Putra, H. F. (2014). Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR).
- Putri, R. K. (2017). Pengaruh Ukuran perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, Likuiditas dan Basic Kepemilikan terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. *JOM Fekon* .
- Qulub, M. A., Amin, M., & Junaidi. (2019). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting* Index (Indeks ISR). *E-JRA* .
- Rama, A., & Meliawati. (2014). Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah* .
- Ramadhani, F. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Dewan pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *JOM Fekon* .
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori-Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal* .
- Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage* dan Islamic Governance Score terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* .

- Rostiani, S. S., & Sukanta, T. A. (2018). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* .
- Sawitri, D. R., Juanda, A., & Jati, A. w. (2017). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*. *Jurnal Ilmiah akuntansi : Kompartemen* .
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* .
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & L, S. W. (2012). *Islamic Social Reporting Index* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Dinamika Akuntansi* .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarsih, U., & Ferdiyansyah. (2017). Determinants of the *Islamic Social Reporting* Disclosure. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* .
- Sutapa, & Laksito, H. (2018). Peran *Islamic Social Reporting* terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia* .
- Syahputri, Y. A., & Surenggono. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Global Reporting Initiative Index dan *Islamic Social Reporting Index* dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018. *Liability* .
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* .
- Zanariatn, A., Bayinah, A. N., & Syahroni, O. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* .

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Return On Assets (X1)

NO	BANK	TAHUN	PROFITABILITAS (X1)
1	PT. BCA Syariah	2017	0,00803
		2018	0,00826
		2019	0,00778
2	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	2017	0,00320
		2018	0,00281
		2019	0,00172
3	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	0,00415
		2018	0,00615
		2019	0,01135
4	PT. Bank Mega Syariah	2017	0,01031
		2018	0,00635
		2019	0,00614
5	PT. Bank Syariah Bukopin	2017	0,00023
		2018	0,00035
		2019	0,00026
6	PT. Maybank Syariah Indonesia	2017	-0,00767
		2018	0,00635
		2019	0,00614
7	PT. BNI Syariah	2017	0,00881
		2018	0,01014
		2019	0,01207
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	-0,11227
		2018	0,00237
		2019	0,00119
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	-0,04971
		2018	0,00251
		2019	0,00199
10	PT. Bank Aceh Syariah	2017	0,01917
		2018	0,01903
		2019	0,01801
11	PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	0,00042
		2018	0,00080
		2019	0,00032

Lampiran 2

Data Debt to Equity (X2)

NO	BANK	TAHUN	LEVERAGE (X2)
1	PT. BCA Syariah	2017	0,66
		2018	0,61
		2019	0,61
2	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	2017	3,50
		2018	2,37
		2019	2,33
3	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	1,85
		2018	1,80
		2019	2,06
4	PT. Bank Mega Syariah	2017	1,08
		2018	0,78
		2019	0,78
5	PT. Bank Syariah Bukopin	2017	1,74
		2018	1,44
		2019	1,54
6	PT. Maybank Syariah Indonesia	2017	0,69
		2018	0,25
		2019	0,20
7	PT. BNI Syariah	2017	1,74
		2018	2,31
		2019	2,76
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	2,39
		2018	0,51
		2019	0,34
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	1,00
		2018	1,20
		2019	1,48
10	PT. Bank Aceh Syariah	2017	1,32
		2018	1,56
		2019	1,28
11	PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	1,80
		2018	2,41
		2019	2,44

Lampiran 3

Data Ukuran Dewan Komisaris (X3)

NO	BANK	TAHUN	UKURAN DEWAN KOMISARIS(X3)
1	PT. BCA Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
2	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	2017	4
		2018	4
		2019	4
3	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	4
		2018	4
		2019	4
4	PT. Bank Mega Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
5	PT. Bank Syariah Bukopin	2017	4
		2018	4
		2019	3
6	PT. Maybank Syariah Indonesia	2017	3
		2018	3
		2019	3
7	PT. BNI Syariah	2017	4
		2018	4
		2019	4
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
10	PT. Bank Aceh Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
11	PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	5
		2018	5
		2019	5

Lampiran 4

Data Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X4)

NO	BANK	TAHUN	UKURAN DPS(X4)
1	PT. BCA Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
2	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
3	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	3
		2018	3
		2019	3
4	PT. Bank Mega Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
5	PT. Bank Syariah Bukopin	2017	2
		2018	2
		2019	2
6	PT. Maybank Syariah Indonesia	2017	2
		2018	2
		2019	2
7	PT. BNI Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2017	3
		2018	3
		2019	3
10	PT. Bank Aceh Syariah	2017	2
		2018	2
		2019	2
11	PT. Bank Muamalat Indonesia	2017	3
		2018	3
		2019	2

Lampiran 5

Data Islamic Social Reporting (Y)

PT. BCA Syariah

NO	INDIKATOR	BCAS		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	7	9	10
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	1
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1

16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	0	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	0	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	7	8	7
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	0	0	0
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	1	1
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	0	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	1	1	1
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0

38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	17	18	18
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1
41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	1
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	1	1
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	0	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	1	0
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	40	44	44
	ISR	0,67	0,73	0,73

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

NO	INDIKATOR	BRIS		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	9	9	9
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	8	8	7
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	0
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	2	2	2
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	17	18	17

39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	0	0	0
41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	1	1	1
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	1	1	1
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	1	1
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	1	1
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	0
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	0	0	0
	TOTAL	44	45	43
	ISR	0,73	0,75	0,72

PT. Bank Syariah Mandiri

NO	INDIKATOR	BSM		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	9	12	11
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	1	1
12	Hari Libur	0	1	1
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	1	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	9	10	10
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	1	1
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	1	1
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	1	1	1
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	16	17	18
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	0	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	1	1
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	1
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	0	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	1	0
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	0	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	43	48	48
	ISR	0,72	0,80	0,80

PT. Bank Mega Syariah

NO	INDIKATOR	BMS		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	8	8	8
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	0	0	0
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	9	9	8
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	1	1	1
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	0	0
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	1	1
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	0
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	1	1	1
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	18	18	16
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	1	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	1	0
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	44	44	41
	ISR	0,73	0,73	0,68

PT. Bank Syariah Bukopin

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	4	4	4
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	0	0	0
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	2	2	2
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	0	0	0
C	TEMA KARYAWAN	9	7	8
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	0	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	0	0
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	6	7	6
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	1	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	0	0	0
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	0	0	0
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	1	1	2
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	17	18	17
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	1	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	1	1
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	39	39	39
	ISR	0,65	0,65	0,65

PT. Maybank Syariah Indonesia

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	1	1	1
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	0	0	0
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	2	2	2
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	0	0	0
C	TEMA KARYAWAN	7	7	5
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	0
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	0	0	0
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	0
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	0	0	0

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	9	9	4
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	1	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	0
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	0
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	0
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	0
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	0	0	0
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	0	0	0
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	16	16	16
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	0	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	0	0
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	39	39	32
	ISR	0,65	0,65	0,53

PT. BNI Syariah

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	10	10	10
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	1	1	1
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	10	9	3
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	0
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	1	1	1
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	0
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	0
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	0
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	0
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	0
E	TEMA LINGKUNGAN	3	2	1
34	Konservasi lingkungan hidup	1	1	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	1	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	18	17	18
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	0	1
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	1	1
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	49	46	40
	ISR	0,82	0,77	0,67

PT. Bank Panin Dubai Syariah

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	6	6	6
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	1	1	1
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	10	9	9
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	1	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	7	7	7
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	0
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	0	0	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	1	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	1	1	1
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	17	19	19
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	1	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	0	1
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	1	1
50	Pemblokiran dana nasabah	1	1	1
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	44	45	45
	ISR	0,73	0,75	0,75

PT. Bank Jabar Banten Syariah

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	5	5	5
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	0	0	0
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	2	2	2
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	0	0	0
C	TEMA KARYAWAN	8	8	8
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	0
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1

18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	0	0	0
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1
20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	6	7	5
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	1	1	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	0	1	0
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	0	0	0
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	0	0	0
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	0	1	0
34	Konservasi lingkungan hidup	0	1	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	0	0	0
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	17	19	18

39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1
41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	1
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	1	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	1	0
50	Pemblokiran dana nasabah	1	1	1
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	38	42	38
	ISR	0,63	0,70	0,63

PT. Bank Aceh Syariah

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	6	6	6
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	1	1	1
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	2	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	0	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	7	7	8
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	0
12	Hari Libur	0	0	1
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	0	0	0
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	0	0	0

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	0	0	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	9	7	8
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	0	0	0
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1	0	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	0	1	1
34	Konservasi lingkungan hidup	0	0	0
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	0	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	0	0	0
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	16	17	16
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	0	0	0
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	0	0	0
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	0	0	0
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	0	0	0
49	Gerbang pembayaran Nasional	0	1	0
50	Pemblokiran dana nasabah	0	0	0
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	40	41	42
	ISR	0,67	0,68	0,70

PT. Bank Muamalat Indonesia

NO	INDIKATOR	BSB		
		2017	2018	2019
A	TEMA PENDANAAN DAN INVESTASI	6	6	6
1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga)	1	1	1
2	Kegiatan yang mengandung gharar (<i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i>)	1	1	1
3	Zakat (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	1	1	1
5	Kegiatan Investasi (secara umum)	1	1	1
6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	1	1	1
B	TEMA PRODUK DAN JASA	3	3	3
7	Pernyataan DPS tentang kehalalan produk dan jasa baru	1	1	1
8	Jenis dan definisi setiap produk	1	1	1
9	Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan penyelesaian)	1	1	1
C	TEMA KARYAWAN	11	10	11
10	Jumlah Karyawan	1	1	1
11	Jam Kerja	0	0	1
12	Hari Libur	1	0	1
13	Tunjangan Karyawan	1	1	1
14	Kebijakan Remunerasi	1	1	1
15	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	1	1	1
16	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	1	1	1
17	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	1	1	1
18	Kesehatan dan keselamatan karyawan	1	1	1
19	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	1	1

20	Tempat ibadah yang memadai	0	0	0
21	Waktu ibadah/kegiatan religius	1	1	0
22	Kesejahteraan karyawan	1	1	1
D	TEMA MASYARAKAT	8	8	9
23	Sedekah/donasi (jumlah dan penyaluran dana)	1	1	1
24	Wakaf (jenis dan penyaluran)	0	0	0
25	<i>Qard Hasan</i> /pinjaman kebaikan (jumlah dan penyaluran)	1	1	1
26	Sukarelawan dari kalangan karyawan	1	1	1
27	Pemberian beasiswa sekolah	1	1	1
28	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	0	0	0
29	Pengembangan generasi muda	1	1	1
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	0	0	1
31	Kepedulian terhadap anak-anak	1	1	1
32	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan infrastruktur dll)	1	1	1
33	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan)	1	1	1
E	TEMA LINGKUNGAN	2	3	3
34	Konservasi lingkungan hidup	0	1	1
35	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih dll)	1	1	1
36	Pendidikan terhadap lingkungan hidup)	1	1	1
37	Penghargaan dibidang lingkungan hidup	0	0	0
38	Sistem manajemen lingkungan hidup	0	0	0
F	TEMA TATA KELOLA PERUSAHAAN	22	21	22
39	Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS)	1	1	1
40	Pendapatan dan penggunaan dana non halal	1	1	1

41	Struktur kepemilikan saham	1	1	1
42	Kebijakan anti korupsi	1	1	1
43	Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	1	1	1
44	Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	1	1	1
45	Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik	1	1	1
46	Pelaksanaan sertifikat Treasuri dan penerapan kode etik pasar	1	1	1
47	Penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan	1	0	1
48	Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan	1	1	1
49	Gerbang pembayaran Nasional	1	1	1
50	Pemblokiran dana nasabah	1	1	1
51	Perkara hukum	1	1	1
52	Rincian nama dan profil dewan komisaris	1	1	1
53	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
54	Remunerasi dewan komisaris	1	1	1
55	Rincian nama dan profil dewan direksi	1	1	1
56	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
57	Remunerasi dewan direksi	1	1	1
58	Rincian nama dan profil DPS	1	1	1
59	Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	1	1	1
60	Remunerasi DPS	1	1	1
	TOTAL	52	51	54
	ISR	0,87	0,85	0,90

Lampiran 6 : Uji Statistik

Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA (X1)	33	-,11227	,01917	,0005079	,02317397
DER (X2)	33	,20	3,50	1,4797	,81160
UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	33	3	5	3,52	,667
UKURAN DPS (X4)	33	2	3	2,24	,435
ISR (Y)	33	,53	,90	,7179	,07676
Valid N (listwise)	33				

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05590580
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,106
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA (X1)	,875	1,143
	DER (X2)	,462	2,167
	UKURAN DEWAN	,425	2,350
	KOMISARIS (X3)		
	UKURAN DPS (X4)	,875	1,143

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,910	3,079		-3,219	,003
	ROA (X1)	-29,223	20,446	-,268	-1,429	,164
	DER (X2)	-1,502	,804	-,483	-1,868	,072
	UKURAN DEWAN	1,413	1,019	,374	1,388	,176
	KOMISARIS (X3)					
	UKURAN DPS (X4)	,008	1,089	,001	,008	,994

a. Dependent Variable: LnRES_2

Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,685 ^a	,470	,394	,05977	1,476

a. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), ROA (X1), DER (X2), UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)

b. Dependent Variable: ISR (Y)

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,422	,073		5,753	,000
	ROA (X1)	-,180	,487	-,054	-,369	,715
	DER (X2)	-,008	,019	-,089	-,440	,663
	UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	,085	,024	,743	3,521	,001
	UKURAN DPS (X4)	,003	,026	,020	,133	,895

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,422	,073		5,753	,000
	ROA (X1)	-,180	,487	-,054	-,369	,715
	DER (X2)	-,008	,019	-,089	-,440	,663
	UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)	,085	,024	,743	3,521	,001
	UKURAN DPS (X4)	,003	,026	,020	,133	,895

a. Dependent Variable: ISR (Y)

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,089	4	,022	6,197	,001 ^b
	Residual	,100	28	,004		
	Total	,189	32			

a. Dependent Variable: ISR (Y)

b. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), ROA (X1), DER (X2), UKURAN DEWAN
KOMISARIS (X3)

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,685 ^a	,470	,394	,05977	1,476

a. Predictors: (Constant), UKURAN DPS (X4), ROA (X1), DER (X2), UKURAN DEWAN KOMISARIS (X3)

b. Dependent Variable: ISR (Y)

Lampiran 7 : Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Aning Yusrina Hanifah
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 23 September 1999
Alamat Asal : RT. 29 RW. 07 Desa Dongko Kecamatan Dongko
Kab. Trenggalek
Telepon/HP : 085252967992
E-mail : aningyusrina@gmail.com

Pendidikan Formal

2003 – 2005 : TK Pertiwi Dongko
2005 – 2011 : SDN 5 Dongko
2011 – 2014 : SMPN 1 Dongko
2014 – 2017 : SMA Darul ‘Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang
2017 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017 – 2018 : Ma’had Sunan Ampel Al–Aly
2017 – 2018 : Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2018 – 2019 : English Language Center (ELC) UINMalang

Pengalaman Organisasi

2018 – 2019 : Pengurus UKM Seni Religius

Aktivitas dan Pelatihan

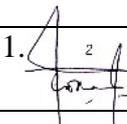
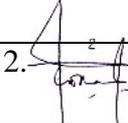
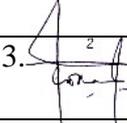
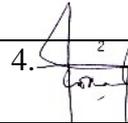
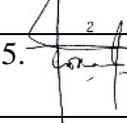
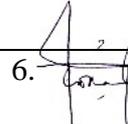
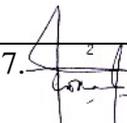
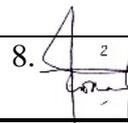
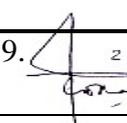
- Peserta Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Pribadi Ulul Albab sebagai Pilar Eksistensi dan Kemajuan NKRI” tahun 2017
- Peserta Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Optimalisasi Peran Mahasiswa Terhadap Perekonomian Bangsa Melalui Digitalisasi Ekonomi Kreatif” tahun 2017
- Peserta Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi dengan tema “Profesionalisme Akuntan di Era Sustainable Development Goals (SDGs)” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “*Buid Your Digital Business and be Millennia Entrepreneur*” yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta pelatihan kewirausahaan dengan tema “Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Perwujudan Peran Mahasiswa” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2017
- Peserta Accounting Study Club dengan tema “Laporan Keuangan dalam Sudut Pandang Akuntansi Pesantren” yang diselenggarakan oleh Anggota Muda IAI Jawa Timur tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018
- Peserta Roadshow Seminar Pasar Modal Syariah pada tahun 2018
- Peserta Visiting Company dengan tema “Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Dunia Industri dan Keuangan” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi pada tahun 2018
- Peserta kuliah umum dengan tema “Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang Financial Technology Perguruan Tinggi” pada tahun 2018

- *Participant in English Exposure and English Program Socialization* yang diselenggarakan oleh *English Language Center* pada tahun 2019
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Peserta Webinar Nasional dengan tema “*How to Change Skripsi to Article*” yang diselenggarakan oleh EL Muhasaba pada tahun 2020
- Peserta *Training Of Statistics Software* oleh *Research and Statistical Laboratory* Fakultas Ekonomi UIN Malang pada tahun 2020

Lampiran 8 : Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aning Yusrina Hnaifah
NIM/Jurusan : 17520024/Akuntansi
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
Judul Skripsi : Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	03 Oktober 2020	Pengajuan Judul	1. 
2.	31 Oktober 2020	Proposal	2. 
3.	23 Februari 2021	Revisi & Acc Proposal	3. 
4.	08Maret 2021	Seminar Proposal	4. 
5.	16 Maret 2021	Acc Proposal	5. 
6.	26 Mei 2021	Konsultasi BAB IV dan V	6. 
7.	27 Mei 2021	Acc BAB IV dan V	7. 
8.	03 Juni 2021	Ujian Skripsi	8. 
9.	23 Juni 2021	ACC Keseluruhan	9. 

Malang,.....
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

